



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
Bogor, Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Kupersembahkan kepada
ayah, ibu, nenek dan
adik-adikku di Jombang,
serta Heny di Bogor

A / SEP / 1989 / 061

**MEMPELAJARI BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT BIMAS PADI
OLEH PETANI PADA MUSIM TANAM 1982/1983**

**Studi Kasus di Kecamatan Ngoro,
Kabupaten Jombang**

oleh

ARIEF DARYANTO

**JURUSAN ILMU - ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



**B O G O R
1 9 8 4**



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



RINGKASAN

ARIEF DARYANTO. Mempelajari Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi oleh Petani pada Musim Tanam 1982/1983. Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. (Dibawah bimbingan HARJADI HADI-KOESWORO).

Dilihat dari segi peningkatan produksi, program intensifikasi padi melalui Bimas telah memberikan hasil yang menggembirakan. Namun dipandang dari segi perkreditan masih ada hal yang patut dicemaskan, yakni adanya kecenderungan bahwa penyaluran kredit Bimas semakin menurun; pengembaliannya kurang lancar, sehingga jumlah tunggakan makin besar. Padahal keberhasilan suatu program perkreditan ditentukan secara bersama oleh peningkatan produksi dan besarnya tingkat pembayaran kembali kredit tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk; (1) mempelajari faktor-faktor karakteristik petani peminjam kredit Bimas padi, (2) mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi oleh petani, dan (3) menemukan berbagai alasan yang menimbulkan adanya tunggakan kredit Bimas padi oleh petani.

Adapun faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali, digolongkan menjadi faktor-faktor non ekonomi dan ekonomi. Yang tergolong faktor-faktor non ekonomi adalah umur petani, tingkat pendidikan petani,



tagihan aktif, frekuensi turut Bimas, dan sikap petani terhadap pembayaran kembali. Sedangkan yang tergolong faktor-faktor ekonomi adalah luas sawah garapan yang dimiliki petani, produktifitas usahatani padi, pendapatan total petani dan jumlah beban keluarga.

Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan analisis data sebagai berikut: (1) karakteristik dari petani peminjam digambarkan secara statistik dengan jalan menghitung rata-rata, jumlah kasus, variabilitas dan angka-angka dalam bentuk persentase, dan (2) digunakan uji Kai Kuadrat untuk mendeteksi hubungan antara faktor-faktor karakteristik petani dengan tingkat pembayaran kembali, sedangkan keeratan hubungan diuji dengan menggunakan koefisien kontingensi menurut Cramer.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 40 petani contoh, diperoleh karakteristik petani peminjam, yang diukur secara rata-rata, adalah sebagai berikut: (1) umur petani 43.72 tahun, (2) pendidikan formal petani 5.22 tahun, (3) frekuensi turut Bimas 7 musim tanam, (4) luas sawah garapan yang dimiliki petani 1.10 hektar, (5) produktifitas usahatani padi 5.35 ton gabah kering panen, (6) pendapatan total petani setiap tahun Rp 1 034 612.50, dan (7) jumlah beban keluarga 5.40 orang. Sedangkan petani yang merasa ditagih secara aktif oleh petugas sebanyak 23 petani (57.50 persen) dengan rata-rata frekuensi penagihan sebanyak 1.48 kali. Hanya 3 petani dari 40 petani contoh

(7.50 persen) yang bersikap negatif terhadap pembayaran kembali.

Faktor-faktor non ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali adalah tagihan aktif dan frekuensi turut Bimas. Sedangkan faktor ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali, hanyalah jumlah beban keluarga.

Alasan-alasan yang diungkapkan petani sehubungan dengan tunggakannya adalah: (1) sikap petani yang sengaja tidak mengembalikan, walaupun petani tersebut mampu membayar kembali, (2) digunakan untuk membayar hutang lain, (3) hasil padinya sudah dijual sebelum panen (ijon), (4) digunakan untuk kebutuhan atau keperluan lain, (5) digunakan untuk perbaikan rumah/sepeda motor, dan (6) kece-robohan dalam pengembalian.



MEMPELAJARI BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT BIMAS PADI
OLEH PETANI PADA MUSIM TANAM 1982/1983

Studi Kasus di Kecamatan Ngoro,
Kabupaten Jombang

oleh
ARIEF DARYANTO

Laporan Praktek Lapang
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pertanian
pada
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
B O G O R
1 9 8 4

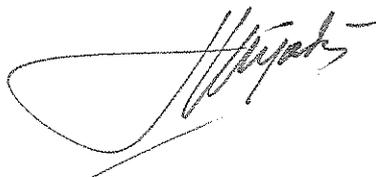
Judul Praktek Lapang : MEMPELAJARI BEBERAPA FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT PEMBAYARAN
KEMBALI KREDIT BIMAS PADI OLEH PE-
TANI PADA MUSIM TANAM 1982/1983.
Studi Kasus di Kecamatan Ngoro,
Kabupaten Jombang

Nama Mahasiswa : ARIEF DARYANTO

Nomor Pokok : A. 170719

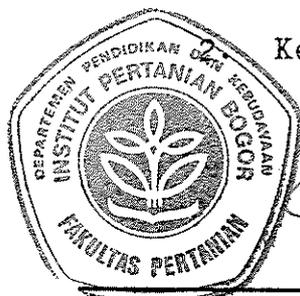
Menyetujui

1. Dosen Pembimbing



(Ir. Harjadi Hadikoesworo, M.Sc.,M.A.)

Ketua Jurusan



(Prof. Dr. Ir. Affendi Anwar)

Tanggal Lulus : 17 Nopember 1984

RIWAYAT HIDUP

Arief Daryanto dilahirkan pada tanggal 18 Juni 1961 di Jombang, Jawa Timur. Ia adalah anak pertama dari lima bersaudara. Orangtuanya bernama M. Soedarjono dan Rr. Roesti-ani.

Pada tahun 1973, ia lulus dari sekolah dasar dan melanjutkan ke SMP Negeri I Jombang. Setelah lulus SMP pada tahun 1976, ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) Jombang. Pada tahun 1980, ia lulus dari SMPP dan kemudian diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur Proyek Perintis II. Pada tahun 1981, ia tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian dengan minat utama Perusahaan Pertanian (Agribisnis).

Selama di Institut Pertanian Bogor, ia pernah menjadi asisten luar biasa untuk beberapa matakuliah, antara lain: Sosiologi Pedesaan pada semester II tahun akademik 1981/1982; Pengantar Ekonomi Umum pada semester I dan II tahun akademik 1982/1983; Ilmu Usahatani pada semester I tahun akademik 1983/1984; Koperasi pada semester II tahun akademik 1983/1984 dan Pengantar Ekonomi Pertanian pada semester II tahun akademik 1983/1984.

Pada bulan Nopember 1984, ia menjadi anggota team "Studi Pengembangan Wilayah Desa Pantai di Jawa Tengah", di bawah pimpinan Prof. Dr. Ir. Affendi Anwar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Mahaesa, atas rampungnya tulisan yang berupa laporan praktek lapang ini. Praktek Lapang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Bagi penulis, praktek lapang yang dilakukan sejak 9 Juli hingga 10 September 1984 berupa suatu penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi, dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Penulis merasa tertarik terhadap masalah tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi, karena didasarkan pada kenyataan bahwa dalam program intensifikasi padi melalui Bimas terdapat kecenderungan jumlah tunggakan yang semakin besar. Dan hal ini berlawanan dengan adanya hasil yang menggembirakan dalam peningkatan produksi padi yang dicapai melalui program tersebut. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mempelajari masalah terjadinya tunggakan kredit Bimas padi di tingkat petani.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada Ir. Harjadi Hadikoesworo, M.Sc.,M.A. selaku dosen pembimbing atas kritik, saran dan bimbingannya sehingga tulisan ini dapat dirampungkan. Kepada Direktur Utama Kantor Besar BRI Jakarta beserta staf, yang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan

penelitian di wilayah kerja BRI Cabang Jombang, disampaikan rasa terimakasih.

Penulis sangat berterimakasih kepada Pimpinan BRI Cabang Jombang, Haji Djamhur beserta stafnya, yakni staf Operation Officer, M. Soedarjono, staf Credit Officer, Suwandi dan staf Unit Desa Officer, Sudirman H.D., yang telah membantu penulis di dalam pemberian ijin dan penyediaan data sekunder bagi kelancaran penelitian. Kepada pegawai-pegawai BRI Unit Desa Ngoro, Sunyoto, Subyantoro, Sunari, Setyo dan Solikan yang secara bergantian senantiasa menemani penulis selama penelitian, diucapkan pula rasa terimakasih atas pelayanannya yang simpatik.

Kepada Dr. Ir. Kuntjoro, disampaikan rasa terimakasih atas kesediaannya untuk diajak beberapa kali diskusi mengenai masalah kredit Bimas di Indonesia dan peminjaman bahan-bahan pustakanya kepada penulis.

Rasa terimakasih, patut pula disampaikan kepada Yayasan Aji Dharma Bhakti yang telah memberikan bea siswa kepada penulis untuk tambahan biaya kuliah selama satu tahun pada tahun akademik 1983/1984.

Bantuan dari para petugas perpustakaan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Ranti Dirman dan Mulyadi, sangat dihargai.

Kepada ayah, ibu, nenek dan adik-adikku serta Heny Kuswanti yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa sampai rampungnya tulisan ini, disampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya.



Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi, bahasa dan penyajiannya, walaupun untuk menulis laporan ini telah dilakukan usaha yang maksimal sesuai dengan waktu, dana dan kemampuan yang dimiliki penulis. Karena itu saran, kritik maupun komentar-komentar yang bersifat positif akan diterima dengan senang hati. Terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi segala pihak yang memerlukannya.

Bogor, Nopember 1984

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	5
Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPSIONAL	9
Tinjauan Pustaka	9
Umur Petani	11
Tingkat Pendidikan Petani	11
Tagihan Aktif	13
Frekuensi Turut Bimas	13
Sikap Petani terhadap Pembayaran Kembali Kredit Bimas	14
Luas Sawah Garapan yang Dimiliki Petani	15
Produktifitas Usahatani Padi	16
Pendapatan Total Petani	17
Jumlah Beban Keluarga	18
Kerangka Konseptual	18
METODOLOGI PENELITIAN	24
Pemilihan Daerah Penelitian	24
Pemilihan Petani Contoh	25
Jenis dan Sumber Data	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Batasan Operasional dan Pengukuran	26
Pernyataan Hipotesis Nol	29
Analisis Data	30
Pengolahan Data	31
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	32
Lokasi Desa Penelitian	34
Desa Banyuarang	34
Desa Pulorejo	36
Penduduk dan Sumber Mata Pencaharian	36
Tanah Pertanian	42
Kredit Bimas Padi MT 1982/1983	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
Karakteristik Petani Peminjam	48
Faktor-Faktor Non Ekonomi	48
Faktor-Faktor Ekonomi	52
Pengaruh Faktor Karakteristik Petani terhadap Tingkat Pembayaran Kembali	56
Umur Petani	56
Tingkat Pendidikan Petani	57
Tagihan Aktif	58
Frekuensi Turut Bimas	60
Sikap Petani terhadap Pembayaran Kembali Kredit Bimas	61
Luas Sawah Garapan yang Dimiliki Petani	63
Produktifitas Usahatani Padi	64
Pendapatan Total Petani	65
Jumlah Beban Keluarga	67



Alasan-Alasan Tentang Terjadinya Tunggakan	68
KESIMPULAN DAN SARAN	70
Kesimpulan	70
Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983	37
2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983	38
3.	Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983	40
4.	Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Utama di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983	42
5.	Luas Tanah Menurut Penggunaan Tanah di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983	43
6.	Keadaan Kredit Bimas Padi MT 1982/1983 di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, Nopember 1983	45
7.	Realisasi Kredit Bimas Padi MT 1982/1983 di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo	47
8.	Distribusi Petani Menurut Umur	49
9.	Distribusi Petani Menurut Tingkat Pendidikan Petani	50
10.	Distribusi Petani Menurut Frekuensi Turut Bimas	51
11.	Distribusi Petani Menurut Luas Sawah Garapan yang Dimiliki	53
12.	Distribusi Petani Menurut Produktifitas Usahatani Padi	54
13.	Distribusi Petani Menurut Jumlah Beban Keluarga	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

14.	Hubungan Antara Golongan Umur dan Tingkat Pembayaran Kembali	57
15.	Hubungan Antara Golongan Tingkat Pendidikan Petani dan Tingkat Pembayaran Kembali	58
16.	Hubungan Ada/Tidak Adanya Tagihan Aktif (ATA/TATA) dan Tingkat Pembayaran Kembali	60
17.	Hubungan Antara Golongan Frekuensi Turut Bimas dan Tingkat Pembayaran Kembali .	61
18.	Hubungan Antara Golongan Sikap Petani dan Tingkat Pembayaran Kembali	62
19.	Hubungan Antara Golongan Luas Sawah Garapan yang Dimiliki dan Tingkat Pembayaran Kembali	63
20.	Hubungan Antara Golongan Produktifitas Usahatani Padi dan Tingkat Pembayaran Kembali	64
21.	Hubungan Antara Golongan Pendapatan Total Petani dan Tingkat Pembayaran Kembali	65
22.	Hubungan Antara Golongan Pendapatan Usahatani Padi dan Tingkat Pembayaran Kembali	66
23.	Hubungan Antara Golongan Pendapatan dari Luar Usahatani Padi dan Tingkat Pembayaran Kembali	67
24.	Hubungan Antara Golongan Jumlah Beban Keluarga dan Tingkat Pembayaran Kembali .	68
25.	Alasan-Alasan Tentang Terjadinya Tunggakan oleh 18 Petani Penunggak	69





DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Hubungan Faktor-Faktor yang Diduga Berpengaruh terhadap Tingkat Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi	23
2.	Peta Kabupaten Jombang	33
3.	Peta Kecamatan Ngoro	35

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Perkembangan Penyaluran dan Pengembalian Kredit Bimas Padi per Musim Tanam, Januari 1984	79
2. Analisis Statistik Data Karakteristik Petani	80
3. Analisis Statistik untuk Memperoleh Hubungan/Pengaruh dan Pengujian Hubungan/Pengaruh	83
4. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang No. EK.011/205/1982, Tentang Penyelesaian Tunggakan Kredit Program Massal (Inpres 10/1981)	87
5. Surat Presiden Republik Indonesia No. B.30/Pres/6/1977, Tentang Pelaksanaan Bimas dan Masalah Pengembalian Kredit Bimas	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seperti pada banyak negara-negara berkembang, aktivitas ekonomi yang utama bagi penduduk Indonesia adalah dalam sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap merupakan bagian terbesar, meskipun menurun dari 32.70 persen pada tahun 1978 menjadi 29.80 persen pada tahun 1982. Subsektor tanaman pangan menyumbang sebesar 18.60 persen dari PDB pada tahun 1982 atau sebesar 62.50 persen dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDB (Biro Pusat Statistik, 1983).

Masalah pangan merupakan salah satu masalah nasional yang teramat penting, karena hingga saat ini sekitar 68.00 persen pengeluaran per kapita rakyat Indonesia digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan; subsektor pangan menduduki bobot yang paling besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan sebagai indikator inflasi; dan subsektor pangan merupakan salah satu sumber terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Karena hal-hal tersebut di atas, maka jika terjadi kegoncangan pada sektor pangan akan menimbulkan ketidakmampuan situasi sosial politik secara nasional.

Pada tingkat nasional, sekitar 73.00 persen konsumsi kalori berasal dari sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat utama adalah beras (52.20 persen). Disamping itu lebih kurang 50.00 persen kebutuhan protein juga berasal

dari beras. Dengan demikian beras merupakan bahan pangan paling pokok di Indonesia (Departemen Pertanian, 1983).

Hingga saat ini, masih terdapat peluang besar untuk meningkatkan produksi beras dengan jalan menerapkan teknologi yang lebih maju. Hal ini dapat dikaitkan dengan program intensifikasi padi yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar tenaga kerja di sektor pertanian bukan merupakan tenaga terampil terdidik, dimana keahlian dalam menjalankan usahatani hanya berdasarkan pengalaman atau keahlian yang diwariskan turun temurun. Disamping itu ukuran usahatani secara rata-rata untuk Indonesia adalah sangat sempit dan petaninya dihadapkan pada keterbatasan modal. Ketiga hal tersebut di atas merupakan hambatan dalam usaha intensifikasi di Indonesia.

Mosher (1966) berpendapat bahwa dalam hal meningkatkan produksi usahatani dan menggerakkan pertanian secara keseluruhan diperlukan lima faktor pokok (essentials) dan lima faktor pelancar (accelerators). Faktor-faktor pokok tersebut meliputi pasaran untuk hasil pertanian, teknologi yang selalu berubah, tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal, perangsang produksi bagi petani dan pengangkutan. Sedangkan yang termasuk faktor-faktor pelancar adalah pendidikan pembangunan, kredit produksi,



kegiatan bersama (group action) oleh petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian dan perencanaan pembangunan pertanian secara nasional. Di dalam faktor-faktor pelancar yang dikemukakan oleh Mosher tersebut, terlihat pendidikan dan adanya kredit produksi untuk petani. Adanya faktor pendidikan akan dapat mengatasi masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan adanya faktor kredit produksi akan mengatasi masalah keterbatasan modal untuk menerapkan teknologi yang lebih maju.

Sejalan dengan pendapat Mosher tentang arti penting kredit produksi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi usahatani, Ongchan et al. dalam A.M. Anwarul Karim (1976) menyatakan bahwa untuk meningkatkan produksi, petani memerlukan tambahan modal untuk pembelian pupuk, insektisida dan upah kerja. Tambahan modal tersebut harus dibiayai dari kekayaan sendiri sebagai hasil tabungan atau meminjam kepada pihak lain. Akan tetapi mengingat kemampuan modal sendiri sangat kurang dan terbatas, maka dengan kredit memungkinkan petani memperoleh tambahan modal. Tablante dalam A.M. Anwarul Karim (1976), menegaskan pula bahwa kekurangan modal merupakan salah satu sebab serius yang menghambat pembangunan pertanian dan ekonomi pedesaan. Untuk pembangunan pertanian yang semakin berorientasi kepada pasar (more market-oriented), dibutuhkan tambahan modal yang semakin meningkat. Tambahan modal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan modal



petani sendiri. Keadaan ini dapat diatasi dengan pemberi-fasilitas kredit produksi. Mengenai hal ini, World Bank (1974) berpendapat:

"Credit - that is money - can itself grow no-thing. To achieve the objective of expanded pro-duction, borrowed funds must be spent by farmers on physical inputs - fertilizers, seeds, pesti-cides, labour".

Sejak tahun 1964, Pemerintah telah berusaha untuk me-ningkatkan produksi padi melalui perbaikan teknologi, yang kemudian dikenal dengan program Bimbingan Massal (Bimas). Bimas mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan bersama (integrated action) yang menyangkut penyuluhan dan penye-diaan paket produksi pertanian dan kredit untuk meningkat-kan produksi pertanian dengan menerapkan Panca Usahatani (metoda bercocok tanam yang baik, penggunaan bibit unggul, penggunaan irigasi yang baik, penggunaan pupuk dan pembe-rantasan hama dan penyakit tanaman), sekaligus meningkat-kan pendapatan dan kesejahteraan hidup petani beserta ke-luarganya. Terkandung dalam pengertian di atas, Pemerin-tah menyediakan fasilitas kredit dalam program Bimas de-ngan disertai penyuluhan/bimbingan dalam penggunaannya. Fasilitas kredit semacam ini dikenal dengan nama kredit terbimbing atau supervised credit (World Bank, 1974).

Kredit yang disediakan dalam program Bimas (yang se-lanjutnya disebut kredit Bimas), selain bertujuan untuk mengatasi hambatan keterbatasan modal, petani diharapkan akan meningkatkan penggunaan teknologi produksi melalui



pemakaian sarana produksi secara efisien sehingga diperoleh peningkatan produksi dan selanjutnya dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan taraf hidupnya (Kuntjoro, 1983).

Kredit Bimas sangat sesuai dengan keperluan petani karena dapat digunakan secara langsung untuk keperluan usahatani. Kredit diberikan dalam bentuk barang yang berupa pupuk dan obat-obatan dan uang biaya pembelian bibit, biaya penyemprotan/pembelian sprayer serta tambahan biaya intensifikasi (cost of living). Besarnya paket kredit dibuat fleksibel berdasarkan luas tanah dan teknik budidayanya, dengan harapan agar petani dapat memilih paket kredit sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Perumusan Masalah

Dilihat dari segi peningkatan produksi, program intensifikasi padi melalui Bimas telah memberikan hasil yang menggembirakan. Namun dari segi perkreditan masih ada hal yang perlu dicemaskan, yakni adanya kecenderungan bahwa penyaluran kredit Bimas makin menurun sedang pengembalian-nya kurang lancar, sehingga jumlah tunggakan makin membesar (Satuan Pengendali Bimas, 1983). Padahal keberhasilan suatu program kredit ditentukan secara bersama oleh peningkatan produksi dan besarnya tingkat pembayaran kembali kredit tersebut (World Bank, 1974).



Adanya tunggakan terhadap jumlah kredit Bimas yang disalurkan yang semakin meningkat akan mempengaruhi kesiambungan program kredit selanjutnya (Bank Rakyat Indonesia, 1983). Apabila banyak kredit yang tidak kembali, berarti dana kredit yang akan dipinjamkan kembali untuk membiayai pembangunan pertanian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, juga akan berkurang. Begitu pula sebaliknya, dengan lancarnya pengembalian kredit maka usaha-usaha pembangunan yang dapat dibiayai dengan pengembalian kredit tersebut akan semakin meningkat.

Hingga 20 Februari 1984, jumlah tunggakan kredit Bimas padi sebesar Rp 131.84 milyar yang dihitung secara akumulatif sejak MT 1970/1971 sampai dengan MT 1983. Jumlah tunggakan kredit Bimas padi tersebut, sekitar 21.30 persen dari jumlah realisasi kredit Bimas padi yang berjumlah Rp 619.54 milyar (Bank Rakyat Indonesia, 1984). Angka perkembangan realisasi dan tunggakan kredit Bimas padi dari tahun 1970/1971 sampai dengan tahun 1983, dapat dilihat pada Lampiran 1. Sejak tahun 1975/1976 terlihat tunggakan yang terus meningkat. Keadaan ini jelas akan mempengaruhi usaha-usaha pembangunan yang dapat dibiayai dengan dana pengembalian kredit tersebut (revolving funds).

Untuk dapat menekan seminimal mungkin atau untuk mengatasi jumlah tunggakan kredit Bimas yang semakin meningkat, perlu terlebih dahulu ditelaah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat pembayaran kembali kredit



Bimas tersebut, baik faktor-faktor non ekonomi maupun faktor-faktor ekonomi di tingkat petani peminjam. Penelaahan faktor-faktor ini dirasakan sangat penting, karena World Bank (1974) memberikan gambaran bahwa di banyak negara berkembang, penelitian mengenai program perkreditan pertanian sebagian besar hanya diarahkan untuk bagaimana petani mengadopsi program tersebut, sedangkan faktor yang mempengaruhi tingkat pembayaran kredit tersebut dan karakteristik petani peminjam kurang diperhatikan.

Berdasarkan keterangan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor non ekonomi dan ekonomi apa yang berpengaruh pada tingkat pembayaran kembali ?
2. Bagaimana hubungan masing-masing faktor tersebut terhadap tingkat pembayaran kembali ?
3. Mana diantara faktor-faktor tersebut yang berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pembayaran kembali ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, yakni untuk:

1. Mempelajari faktor-faktor karakteristik petani peminjam kredit Bimas padi.
2. Mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi oleh petani.



3. Menemukan berbagai alasan yang menimbulkan adanya tunggakan kredit Bimas padi oleh petani.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan upaya menekan/mencegah adanya tunggakan kredit Bimas padi di daerah penelitian.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPSIONAL

Tinjauan Pustaka

Masalah tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi yang diterima petani selama pelaksanaan program Bimas, hingga saat ini masih cukup mencemaskan. Keadaan tersebut mempunyai arti bahwa pada masa yang akan datang dikhawatirkan terdapat penurunan peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan intensifikasi padi. Tingkat pembayaran kembali yang tidak baik mencerminkan pula kekurangberhasilan program kredit Bimas padi. Hal ini didasarkan pada tolok ukur yang diberikan oleh World Bank (1974) bahwa keberhasilan program kredit pertanian tidak saja tergantung pada keadaan yang menunjukkan banyaknya kredit yang diambil petani untuk menaikkan produksi, melainkan juga tercermin pada tingkat pembayaran kembali dari petani. Karena hal itu, dalam upaya untuk menekan terjadinya tunggakan kredit Bimas padi sekecil mungkin, sangat perlu ditelaah secara mendalam sebab-sebab terjadinya tunggakan kredit Bimas padi dari individu petani sebagai penerima kredit (Kuntjoro, 1983).

Sebenarnya tunggakan kredit Bimas padi tidak semata-mata terjadi oleh ketidakmampuan petani, tetapi disebabkan pula oleh ulah golongan bukan petani yang tidak seharusnya menerima kredit, seperti pamong desa, petugas BRI Unit Desa, petugas koperasi, petugas penyuluh dan lain-lain (Satuan Pengendali Bimas, 1983). Namun karena adanya



keterbatasan waktu, dana dan tenaga, penelitian ini hanya diarahkan kepada penelaahan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi oleh petani.

Tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi dari petani dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi dan faktor-faktor ekonomi (Team Universitas Gajah Mada, 1972 dan Team Aceh, 1975). Faktor-faktor non ekonomi yaitu faktor-faktor sosial budaya (socio-cultural) yang berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi. Sedangkan faktor-faktor ekonomi berhubungan dengan pendapatan petani yang bersangkutan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari studi pustaka dan diskusi-diskusi dengan para pakar peneliti di bidang perkreditan, maka dalam penelitian ini yang termasuk faktor-faktor non ekonomi meliputi umur petani, tingkat pendidikan petani, tagihan aktif, frekuensi turut Bimas dan sikap petani terhadap pembayaran kembali kredit Bimas. Yang tergolong dalam faktor-faktor ekonomi adalah luas pemilikan sawah garapan, produktifitas usahatani padi, pendapatan total petani dan jumlah beban keluarga.

Berikut ini akan dibahas satu per satu peubah-peubah yang tergolong faktor-faktor non ekonomi maupun faktor-faktor ekonomi, yang erat kaitannya dengan tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi oleh petani.



Umur Petani

Petani yang semakin lanjut umurnya akan cenderung berpengaruh negatif terhadap pembayaran kembali kredit Bimas padi, kerana mereka lebih merasakan mampu berdiri sendiri tanpa adanya ikatan secara massal (Kuntjoro, 1983). Keadaan ini menurut Alvin L. Bertland dalam Kuntjoro, 1980 disebabkan karena tingkat umur seseorang menggambarkan keadaan fisik yang berbeda. Semakin tua seseorang relatif berkurang kemampuan fisiknya dan keadaan ini mengurangi partisipasi sosialnya. Dengan demikian orang-orang yang berumur lanjut lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi daripada yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kelompok.

Karena program intensifikasi dengan Bimas merupakan kegiatan kelompok (massal) maka semakin lanjut umur petani, semakin berkurang partisipasinya dalam program tersebut. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi tersebut.

Tingkat Pendidikan Petani

Tingkat pendidikan seseorang mencerminkan kemampuannya, kadar pengetahuannya dan kualifikasi teknisnya. Tingkatan pendidikan akan berpengaruh kepada perubahan sikap dan perilakunya dalam perspektif rangkap perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi dalam perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang dan bebas (rekomendasi UNESCO dalam A.G. Lunandi, 1981).



Dapatlah dimengerti pula, bahwa tingkat pendidikan akan berpengaruh pada kesiapan seseorang untuk menerima inovasi dari luar untuk memanfaatkan dirinya bagi lingkungannya. Petani yang memiliki pendidikan lebih baik akan mempunyai kekuatan melepaskan diri dari kehidupan pertanian yang tradisional ke pertanian yang lebih menggunakan teknologi maju.

Von Oppenfeld dalam A.M. Anwarul Karim (1976) mengatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah tidak hanya membuat kesulitan dalam mengajarkan cara berusahatani yang lebih baik, tetapi juga dalam penggunaan kredit yang tepat. Von Oppenfeld juga berpendapat bahwa tingkat pendidikan petani mempunyai pengaruh yang nyata dengan tingkat pembayaran kembali. Pendapat ini juga didukung oleh A.M. Anwarul Karim (1976) yang melakukan penelitian di Filipina.

Lain halnya dengan dua pendapat di atas, maka Kuntjoro (1983) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pembayaran kembali kredit yang telah diterima petani.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa tingkat pendidikan petani dapat/tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali.



Tagihan Aktif

A.M. Anwarul Karim (1976) dan Kuntjoro (1983) berpendapat bahwa tagihan aktif (pressure collection) berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali. Lebih lanjut, Kuntjoro (1983) mengatakan dari 70.00 persen petani yang merasa pernah ditagih secara aktif oleh petugas, ternyata 54.00 persen telah membayar kembali kredit Bimas seluruhnya, sedangkan 21.00 persen belum membayar kembali kredit Bimas seluruhnya dan 25.00 persen telah membayar kembali sebagian dari kredit Bimas yang diterimanya. Sedangkan petani yang tidak pernah ditagih secara aktif oleh petugas sebanyak 30.00 persen, menunjukkan 30.00 persen telah membayar lunas, 26.00 persen belum membayar kembali kredit Bimas seluruhnya dan 44.00 persen telah membayar sebagian dari kredit Bimas yang diterima.

Berdasar keterangan tersebut, maka tagihan aktif berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali.

Frekuensi Turut Bimas

Frekuensi turut program kredit Bimas dapat digunakan sebagai ukuran kemantapan di dalam pemanfaatan tambahan dana yang diperoleh bagi usaha peningkatan produksi (Kuntjoro, 1983). Adanya keterbatasan faktor-faktor produksi mendorong petani untuk mengikuti program kredit Bimas. Tingginya frekuensi turut Bimas dicerminkan dengan manfaat yang diperoleh dari program kredit Bimas tersebut, sehingga petani merasakan adanya keuntungan dalam mengikuti

program kredit Bimas setiap ada kesempatan. Dengan demikian faktor frekuensi turut Bimas akan lebih mendorong petani untuk membayar kembali kredit yang diterimanya.

Hasil penelitian Kuntjoro (1983), menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi turut Bimas akan semakin baik pula petani membayar kembali kredit Bimas yang pernah diterimanya, demikian sebaliknya. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Team Universitas Gajah Mada (1972) sebelumnya.

Berdasar keterangan di atas, ternyata faktor frekuensi turut Bimas berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi.

Sikap Petani terhadap Pembayaran Kembali Kredit Bimas

Masalah tunggakan kredit tidak saja merupakan pokok utama penghambat program perkreditan selanjutnya, melainkan juga menyangkut kejujuran seseorang (Team Aceh, 1975). Kejujuran seseorang dapat dilihat dari sikap atau attitudenya. Koentjaraningrat (1964) mendefinisikan sikap sebagai suatu kecenderungan yang berasal dari dalam diri individu untuk berkelakuan bagi pola tertentu terhadap suatu obyek berupa manusia, hewan atau benda akibatnya dan perasaannya terhadap obyek tersebut. Dalam penelitian ini akan dilihat sikap petani terhadap pembayaran kembali kredit Bimas padi. A.M. Anwarul Karim (1976) berpendapat bahwa faktor sikap petani terhadap pembayaran kembali berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali dari



kredit yang telah diterima petani. Para petani menganggap penting tentang pembayaran kembali kreditnya, walaupun kredit tersebut berasal dari bank Pemerintah dan para petani setuju terhadap pernyataan bahwa bank yang menyalurkan kredit akan menghentikan pemberian kredit kepada petani yang menunggak untuk musim tanam yang akan datang. Hal yang serupa diungkapkan oleh penelitian Sacay, Tablente, Cagampang secara terpisah di Filipina dalam A.M. Anwarul Karim (1976).

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, disimpulkan bahwa sikap petani terhadap pembayaran kembali berperanan penting terhadap tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi.

Luas Sawah Garapan yang Dimiliki Petani

Luas sawah garapan yang dimiliki petani akan membawa pengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali, karena faktor ini mencerminkan besarnya kredit yang dipinjam petani. Semakin besar kredit yang dipinjamnya maka kemungkinan besar untuk menerapkan penggunaan faktor-faktor produksi lebih intensif akan lebih baik. Penggunaan faktor-faktor produksi yang intensif akan berpengaruh terhadap kenaikan produksi dan pendapatannya. Adanya kenaikan produksi dan pendapatan dapat memberikan kemampuan petani untuk membayar kredit yang diterimanya. Argumentasi ini telah dibuktikan melalui penelitian Team Universitas Gajah Mada (1972). Hal yang serupa diungkapkan oleh Bruce A. Best (1977) yang melakukan penelitian di Filipina, seperti yang



diungkapkan dalam Kuntjoro (1983) bahwa faktor luas sawah garapan berpengaruh positif terhadap tingkat pembayaran kembali kredit yang diterima petani.

Akan tetapi Team Universitas Parahyangan (1972), Team Aceh (1975) dan Kuntjoro (1983) menyatakan bahwa faktor luas sawah garapan yang dimiliki petani tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali.

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, ternyata faktor luas sawah garapan yang dimiliki petani menarik untuk diteliti karena faktor ini dapat atau tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi.

Produktifitas Usahatani Padi

Produktifitas diartikan sebagai hasil produksi per satuan luas atau hasil produksi rata-rata per hektar. Produktifitas usahatani menunjukkan tingkat kemampuan tanah, tingkat teknologi yang digunakan dengan adanya tambahan modal dari kredit Bimas dan kemampuan petani dalam mengelolanya. Tinggi rendahnya produktifitas kemungkinan dapat pula disebabkan oleh tinggi rendahnya pemakaian sarana produksi yang dianjurkan dalam program Bimas. Tingginya produktifitas akan merangsang petani untuk terus melakukan intensifikasi dan membayar kembali kreditnya, begitu pula sebaliknya. Argumentasi ini telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Team Universitas Gajah Mada (1972).



Akan tetapi Team Universitas Parahyangan (1972), Team Aceh (1975) dan Kuntjoro (1983) menyatakan bahwa faktor produktifitas usahatani padi tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali.

Dengan demikian, berdasar argumentasi-argumentasi di atas yang saling bertentangan dapat menimbulkan keraguan bagi peneliti. Dalam keadaan ini, faktor produktifitas usahatani padi dapat/tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali.

Pendapatan Total Petani

Pendapatan yang diperoleh petani, mencerminkan luas tanah yang digarap, produksi yang dihasilkan, peluang ekonomi yang diperoleh dan teknologi yang dipergunakan serta balas jasa yang diperoleh petani. Sumber pendapatan petani dapat berasal dari berbagai kegiatan usaha, baik dari kegiatan usahatani padi atau dari luar usahatani padi maupun usaha-usaha di luar usahatani.

A.M. Anwarul Karim (1976) berpendapat bahwa faktor ini berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali. Semakin tinggi pendapatan total maka semakin baik tingkat pembayaran kembali kredit yang telah diterima petani. Hal yang senada diungkapkan oleh Sacay, Clemente yang melakukan penelitian secara terpisah di Filipina.

Berdasar argumentasi di atas, dalam tinjauan pustaka ini diperoleh hasil bahwa faktor pendapatan total petani berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali.



Jumlah Beban Keluarga

Yang dimaksud dengan beban keluarga adalah jumlah jiwa dalam keluarga termasuk isteri, anak dan orang lain yang menjadi beban/tanggungan petani peserta Bimas. Jumlah beban keluarga erat pengaruhnya dengan besar/kecilnya pengeluaran keluarga untuk keperluan konsumtif (Guy Hunter, 1971). Semakin tinggi jumlah beban keluarga semakin bertambah pengeluaran konsumsi keluarga. Adanya beban keluarga yang besar berarti pendapatan per kapita semakin kecil dan pendapatan tersebut akan lebih cenderung dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya terutama pangan dan sandang, sehingga akan mempengaruhi atau menghambat pembayaran kembali kredit yang diterima petani.

Kerangka Konseptual

Kredit Bimas termasuk salah satu jenis kredit program massal. Adanya kredit program didasarkan pada pemikiran bahwa di satu pihak sebagian besar masyarakat berasal dari golongan berpendapatan rendah terutama pada petani, sehingga jika dilayani kredit cukup riskan dan di lain pihak program untuk meningkatkan taraf hidup petani tersebut dengan pemberian kredit harus tetap dilaksanakan. Ciri-ciri daripada kredit program massal adalah diberikan kepada petani peminjam secara massal yang mempunyai karakteristik pembiayaan usahatani yang lemah; yang tipe usahatannya homogen; dan mempergunakan paket tertentu untuk usahatannya. Ciri-ciri yang terkait pada kredit program massal



ini, memberikan beban pekerjaan yang tinggi karena banyaknya jumlah nasabah yang mengakibatkan kesulitan bagi pelaksana (Satuan Pengendali Bimas sampai dengan Satuan Pengendali Bimas tingkat desa) dalam hal realisasi penyaluran dan pembayaran kembali kredit Bimas padi. Oleh karena itu, program kredit massal merupakan program terpadu dalam sistem pembangunan pertanian (A.M. Anwarul Karim, 1976).

Bagi petani penerima kredit Bimas padi, pembayaran kembali kredit yang diterimanya seharusnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun adanya tunggakan yang semakin meningkat, membuat masalah pembayaran kembali perlu ditangani dengan serius karena hal ini dapat menghambat kelestarian program kredit tersebut. Dan keadaan ini turut pula menambah beban kesulitan bagi pelaksana.

Dari tinjauan pustaka mengenai tingkat pembayaran kembali, ternyata tingkat pembayaran kembali dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang tergolong sebagai faktor non ekonomi maupun faktor ekonomi. Faktor-faktor ini meliputi umur petani, tingkat pendidikan petani, tagihan aktif, frekuensi turut Bimas, sikap petani terhadap pembayaran kembali, luas sawah garapan yang dimiliki petani, produktifitas usahatani padi, pendapatan total petani dan jumlah beban keluarga. Alvin L. Bertland dan Kuntjoro sependapat bahwa umur petani secara teoritik mempengaruhi tingkat pembayaran kembali.



Von Oppenfeld dan A.M. Anwarul Karim menyatakan bahwa tingkat pendidikan petani berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali. Semakin tinggi pendidikan maka semakin baik tingkat pembayaran kembali, demikian pula sebaliknya. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat Kuntjoro, yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan petani tidak berpengaruh terhadap pembayaran kembali.

Penelitian terpisah di Filipina maupun di Indonesia yang dilakukan oleh A.M. Anwarul Karim dan Kuntjoro, menghasilkan pendapat yang sama bahwa tagihan aktif berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali.

Frekuensi turut program kredit Bimas, menurut Team Universitas Gajah Mada dan Kuntjoro, ternyata berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali. Semakin tinggi frekuensi turut program kredit Bimas maka semakin baik pula tingkat pembayaran kembali kredit yang diterimanya.

Team Aceh, A.M. Anwarul Karim, Sacay, Tablante dan Cagampang berpendapat bahwa sikap petani terhadap pembayaran kembali berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali. Salah satu alasan yang mendasari sikap tersebut adalah walaupun kredit disalurkan oleh bank Pemerintah, pembayaran kembali kredit tersebut tetap merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Argumentasi yang menyebutkan bahwa luas sawah garapan yang dimiliki petani berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali, diungkapkan oleh Team Universitas



Gajah Mada dan Bruce A. Best. Akan tetapi Team Universitas Parahyangan, Team Aceh dan Kuntjoro menentang pendapat tersebut.

Begitu pula dengan produktifitas usahatani padi, dipertentangkan pengaruhnya terhadap tingkat pembayaran kembali. Di satu pihak Team Universitas Gajah Mada menyatakan bahwa produktifitas usahatani padi berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali, di lain pihak Team Universitas Parahyangan, Team Aceh dan Kuntjoro menentang pendapat tersebut.

A.M. Anwarul Karim, Sacay dan Clamente yang melakukan penelitian di Filipina, berpendapat sama bahwa pendapatan total petani berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali.

Jumlah beban keluarga yang dapat digunakan sebagai indikator pengeluaran keluarga - argumentasi ini didasarkan pada pertimbangan Guy Hunter bahwa jumlah beban keluarga erat pengaruhnya terhadap pengeluaran keluarga - secara positif dapat mempengaruhi tingkat pembayaran kembali.

Dengan mengindahkan semua pendapat-pendapat di atas, maka dapatlah dibuat satu kesimpulan bahwa umur petani, tingkat pendidikan petani, tagihan aktif, frekuensi turut Bimas, sikap petani terhadap pembayaran kembali, luas sawah garapan yang dimiliki petani, produktifitas usahatani padi, pendapatan total petani dan jumlah beban keluarga,



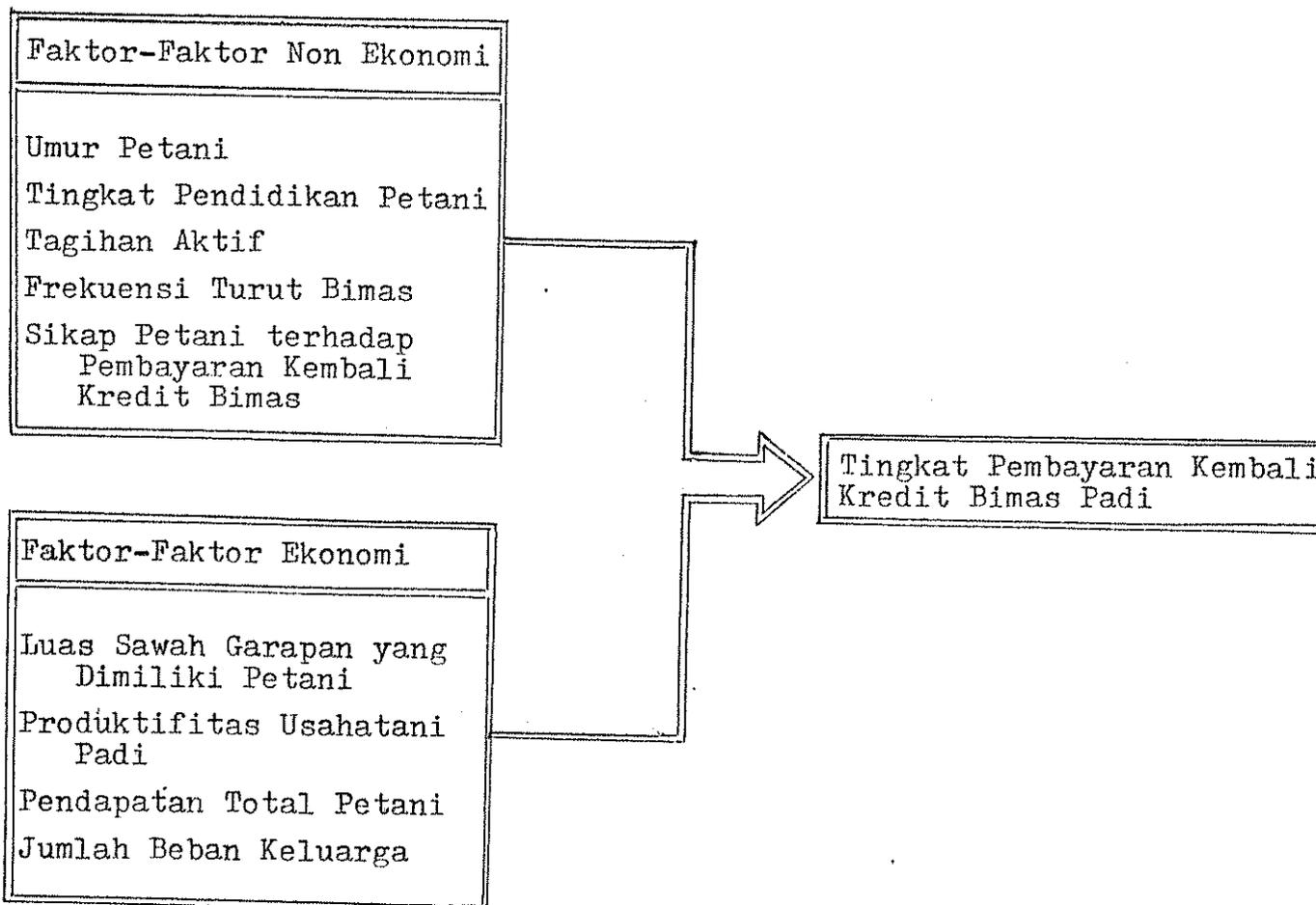
memainkan peranan penting atau berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali. Namun hingga saat ini belum banyak usaha yang berarti, yang mampu menerangkan hubungan faktor-faktor tersebut di atas secara jelas. Penelitian ini mencoba untuk mempelajarinya.

Atas dasar keterangan dari berbagai hasil penelitian dan kerangka teoritik, maka faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi, disusun dalam Gambar 1. Gambar 1 ini akan dipergunakan sebagai pedoman analisis selanjutnya.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University





Gambar 1. Hubungan Faktor-Faktor yang Diduga Berpengaruh Terhadap Tingkat Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi

METODOLOGI PENELITIAN

Pemilihan Daerah Penelitian

Penelitian masalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi dilakukan secara studi kasus di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Dari kecamatan yang dipilih secara sengaja (purposive) tersebut, ditentukan pula dua desa secara sengaja. Pemilihan daerah penelitian secara sengaja didasarkan atas beberapa pertimbangan yang relevan dengan maksud penelitian.

Pemilihan Kecamatan Ngoro berdasarkan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut mampu menggambarkan secara relatif bahwa jumlah tunggakan kredit Bimas padi sejak MT 1975/1976 hingga MT 1982/1983 sama dengan rata-rata jumlah tunggakan di daerah tingkat II Kabupaten Jombang dan relatif besar pula dalam jumlah kredit Bimas padi yang disalurkan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di daerah tingkat II Kabupaten Jombang.

Pemilihan dua desa, yakni Desa Banyuarang dan Desa Pulorejo di Kecamatan Ngoro didasarkan pertimbangan bahwa Desa Banyuarang dipilih untuk mewakili desa baik, yakni desa yang mempunyai jumlah tunggakan kredit Bimas dalam jumlah kecil dan Desa Pulorejo dipilih untuk mewakili desa jelek, yakni desa yang mempunyai jumlah tunggakan kredit Bimas dalam jumlah besar.



Pemilihan daerah penelitian mempertimbangkan pula keterbatasan waktu, dana dan tenaga, tetapi masih diusahakan untuk memperoleh gambaran yang mewakili (representative) keadaan daerah yang diteliti.

Pemilihan Petani Contoh

Sebagai unit contoh dalam penelitian ini adalah petani produsen padi yang menjadi peserta program kredit Bimas padi pada MT 1982/1983. Untuk keperluan itu, dilakukan pentahapan prosedur pemilihan contoh sebagai berikut:

Tahap pertama. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen-dokumen di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jombang dan BRI Unit Desa Ngoro, diperoleh nama-nama petani produsen padi yang menjadi peserta program kredit Bimas padi pada MT 1982/1983 dan tingkat pembayaran kembali kredit Bimasnya, baik di Desa Banyuarang maupun di Desa Pulo-rejo.

Tahap kedua. Dari daftar nama-nama petani peserta program kredit Bimas padi dan tingkat pembayaran kembali kredit Bimasnya, dipilih secara acak distratifikasi berimbang (proportioned stratified random sampling) sejumlah 40 petani peserta program kredit Bimas padi dengan status pemilik penggarap. Jumlah unit contoh tersebut, terdiri dari 22 petani dengan tingkat Tidak Menunggak (TM) dan 18 petani dengan tingkat Menunggak (M).



Jenis dan Sumber Data

Data primer mengenai karakteristik petani contoh yang terpilih dan tingkat pembayaran kembali kredit Bimasnya serta data mengenai usahatani diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dengan petani contoh dilakukan oleh peneliti sendiri. Adapun data yang dikumpulkan merupakan data dalam perioda satu tahun, yaitu mulai bulan Desember 1982 sampai dengan bulan Nopember 1983.

Data sekunder yang dipergunakan untuk pelengkap data primer, dikumpulkan dari Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jombang, BRI Unit Desa Ngoro, Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Jombang, Kantor Kecamatan Ngoro, Kantor Desa Banyuarang dan Desa Pulorejo dan instansi-instansi lain yang bertalian dengan penelitian ini.

Batasan Operasional dan Pengukuran

Berikut ini akan diterangkan pengukuran peubah dan satuan-satuannya yang dipakai dalam penelitian ini.

1. Pengukuran tingkat pembayaran kembali

Tingkat pembayaran kembali diukur atas besarnya pembayaran kembali yang dilakukan petani peminjam dan dinyatakan dalam persen terhadap jumlah pinjaman yang diterima. Kategori Tidak Menunggak (TM), jika petani telah membayar kembali kredit Bimas padi secara penuh (100.00 persen). Kategori Menunggak, jika petani



masih membayar sebagian atau belum membayar kembali kreditnya secara penuh (antara 1.00 persen sampai dengan 99.00 persen).

2. Pengukuran umur petani

Umur petani diukur dalam satuan tahun, sejak petani dilahirkan sampai dengan MT 1982/1983.

3. Pengukuran tingkat pendidikan petani

Tingkat pendidikan petani diukur berdasarkan jumlah tahun pendidikan formal yang pernah diikuti oleh petani.

4. Pengukuran tagihan aktif

Pengukuran tagihan aktif didasarkan pada pernyataan petani, apakah ia pernah ditagih secara aktif oleh petugas lembaga perkreditan atau petugas lain yang berkaitan dengan program kredit Bimas (Satuan Pelaksana Bimas tingkat kecamatan/desa). Tagihan aktif ini dapat berupa peringatan atau teguran akan kewajiban petani membayar kembali kredit yang pernah diterimanya. Adanya Tagihan Aktif (ATA), jika petani menyatakan merasa pernah ditagih secara aktif dan Tidak Adanya Tagihan Aktif (TATA), jika petani menyatakan merasa tidak pernah ditagih secara aktif oleh petugas.



5. Pengukuran frekuensi turut Bimas

Frekuensi turut Bimas diukur dengan pernyataan petani tentang berapa kali ia mengikuti program Bimas sejak MT 1970/1971 sampai saat dilakukan penelitian (MT 1982/1983). Frekuensi turut Bimas dinyatakan dalam jumlah musim tanam.

6. Pengukuran sikap petani terhadap pembayaran kembali

Sikap petani terhadap pembayaran kembali kredit Bimas padi dinilai dengan sikap positif dan sikap negatif atas dasar jawaban petani terhadap pertanyaan: "Ada yang menyatakan bahwa pinjaman kredit Bimas harus dibayar kembali tepat pada waktu yang ditentukan (Setuju/Tidak Setuju)".

7. Pengukuran luas sawah garapan yang dimiliki petani

Luas sawah garapan yang dimiliki petani diukur dalam satuan hektar. Pengukuran dilakukan atas luas sawah garapan milik sendiri yang ditanami padi selama periode MT 1982/1983.

8. Pengukuran produktifitas usahatani padi

Produktifitas dimaksudkan sebagai hasil produksi per satuan luas garapan atau hasil produksi rata-rata per hektar. Dalam penelitian ini, produktifitas diukur dalam satuan ton gabah kering panen (gkp) per hektar.



9. Pengukuran pendapatan total petani

Pendapatan total petani Bimas merupakan penjumlahan pendapatan usahatani padi dengan pendapatan di luar usahatani padi (yaitu dari tanaman palawija, tebu, tanaman tahunan, ternak dan buah-buahan) dan pendapatan di luar usahatani (misalnya kegiatan dalam pemasaran, buruh tani, pertukangan, dan lain-lain). Pendapatan total petani Bimas diukur dalam satuan rupiah selama bulan Desember 1982 hingga bulan Nopember 1983.

10. Pengukuran jumlah beban keluarga

Yang dimaksud dengan beban keluarga adalah jumlah jiwa dalam keluarga termasuk isteri, anak dan orang lain yang menjadi tanggungan petani peserta Bimas. Besar kecilnya beban keluarga dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator besar kecilnya pengeluaran keluarga.

Pernyataan Hipotesis Nol

Berdasarkan pada kerangka konseptual dan tinjauan pustaka, pernyataan hipotesis nol disusun:

Tidak ada hubungan/pengaruh yang nyata (significant) antara tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi dan faktor-faktor non ekonomi maupun faktor-faktor ekonomi:

- a. umur petani
- b. tingkat pendidikan petani



- c. tagihan aktif
- d. frekuensi turut Bimas
- e. sikap petani terhadap pembayaran kembali
- f. luas sawah garapan yang dimiliki petani
- g. produktivitas usahatani padi
- h. pendapatan total petani
- i. jumlah beban keluarga.

Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dan pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis data sebagai berikut:

1. Karakteristik dari petani peserta Bimas padi akan digambarkan secara statistik dengan jalan menghitung rata-rata, ukuran variabilitas, jumlah kasus dan angka-angka dalam bentuk persentase dari data yang terkumpul.
2. Untuk memperoleh hubungan antara faktor-faktor karakteristik petani (faktor-faktor non ekonomi dan faktor-faktor ekonomi) dengan tingkat pembayaran kembali akan dilakukan uji Kai Kuadrat (Chi Square) dengan menggunakan tabel kontingensi. Uji keeratan hubungan antara faktor-faktor karakteristik petani dengan tingkat pembayaran kembali dapat juga mempergunakan perhitungan koefisien kontingensi menurut Cramer.

Keterangan lebih lanjut mengenai pengujian-pengujian secara statistik untuk bagian 1 dan 2 di atas, dapat diikuti pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.



Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan secara tangan (manual) dengan menggunakan kalkulator. Untuk menghindari kesalahan dalam pengolahan data, dilakukan perhitungan ulang.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

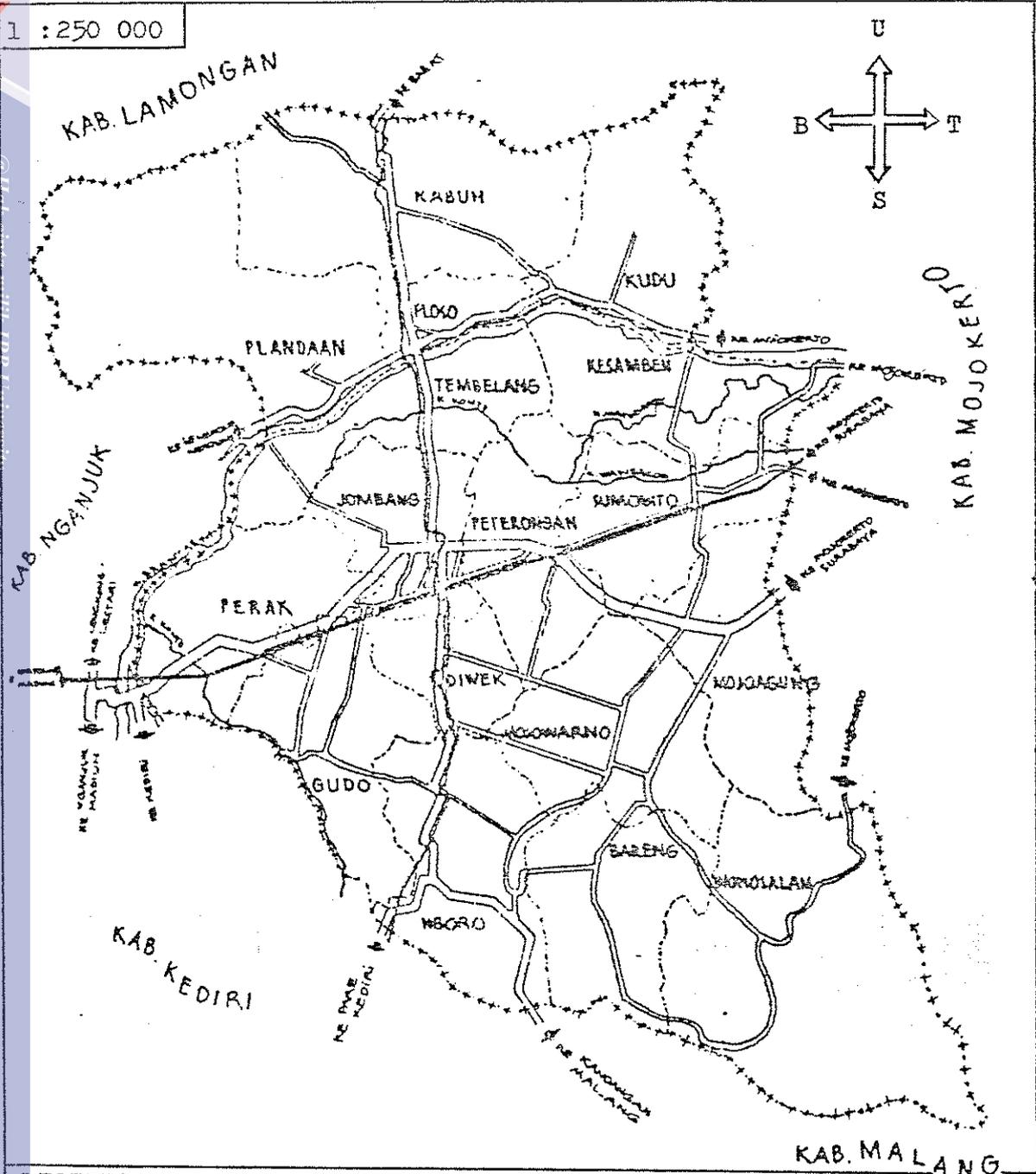


DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Desa Banyuarang dan Desa Pulorejo adalah dua desa di antara 13 desa yang termasuk wilayah Kecamatan Ngoro. Ibukota Kecamatan Ngoro berjarak 22 km dari ibukota kabupaten (lihat Gambar 2) menuju ke arah Selatan. Batas-batas wilayah Kecamatan Ngoro, di sebelah Utara adalah Kecamatan Mojowarno, di sebelah Timur adalah Kecamatan Bareng, di sebelah Selatan adalah Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Pare Dati II Kediri, dan di sebelah Barat adalah Kecamatan Gudo. Keadaan tanah datar dan apabila ditinjau dari permukaan laut, tanah yang terendah 60 m dari permukaan laut (dpl) dan tanah yang tertinggi 88 m dpl.

Luas daerah kecamatan seluruhnya 4 980.34 ha, yang terdiri dari sawah 58.91 persen (2 933.99 ha), tegalan 16.24 persen (809.07 ha), pekarangan 22.91 persen (1 141.06 ha), dan lain-lain 1.97 persen (96.22 ha). Rata-rata luas tiap desanya 383.10 ha. Apabila ditinjau dari karakteristik fisik, Kecamatan Ngoro berciri agraris.

Jumlah penduduk pada tahun 1983 sebesar 54 371 orang, dengan rasio seks sebesar 96.46. Distribusi persentase penduduk menurut pekerjaan utama, 20.50 persen bekerja sebagai petani penggarap, 43.93 persen buruh tani, 8.60 persen buruh industri/kerajinan tangan, 8.60 persen di bidang usaha jasa, 1.52 persen pegawai negeri, 0.29 persen anggota ABRI, dan lain-lain 15.92 persen. Jika jumlah penduduk ditinjau per satuan luas atau angka kepadatan penduduk/km²



LEGENDA :

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|--------------------|
| +++++ | : Batas Kabupaten | ==== | : Jalan Propinsi |
| ----- | : Batas Kawedanan | ===== | : Jalan Kabupaten |
| - - - - - | : Batas Kecamatan | ===== | : Jalan Kereta Api |
| ===== | : Jalan Negara | ===== | : Jalan Tram |
| | | ~~~~~ | : Sungai |

Gambar 2. Peta Kabupaten J o m b a n g

di Kecamatan Ngoro, diperoleh angka 1 088 orang/km². Angka kepadatan penduduk yang tinggi tersebut, merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian.

Lokasi Desa Penelitian

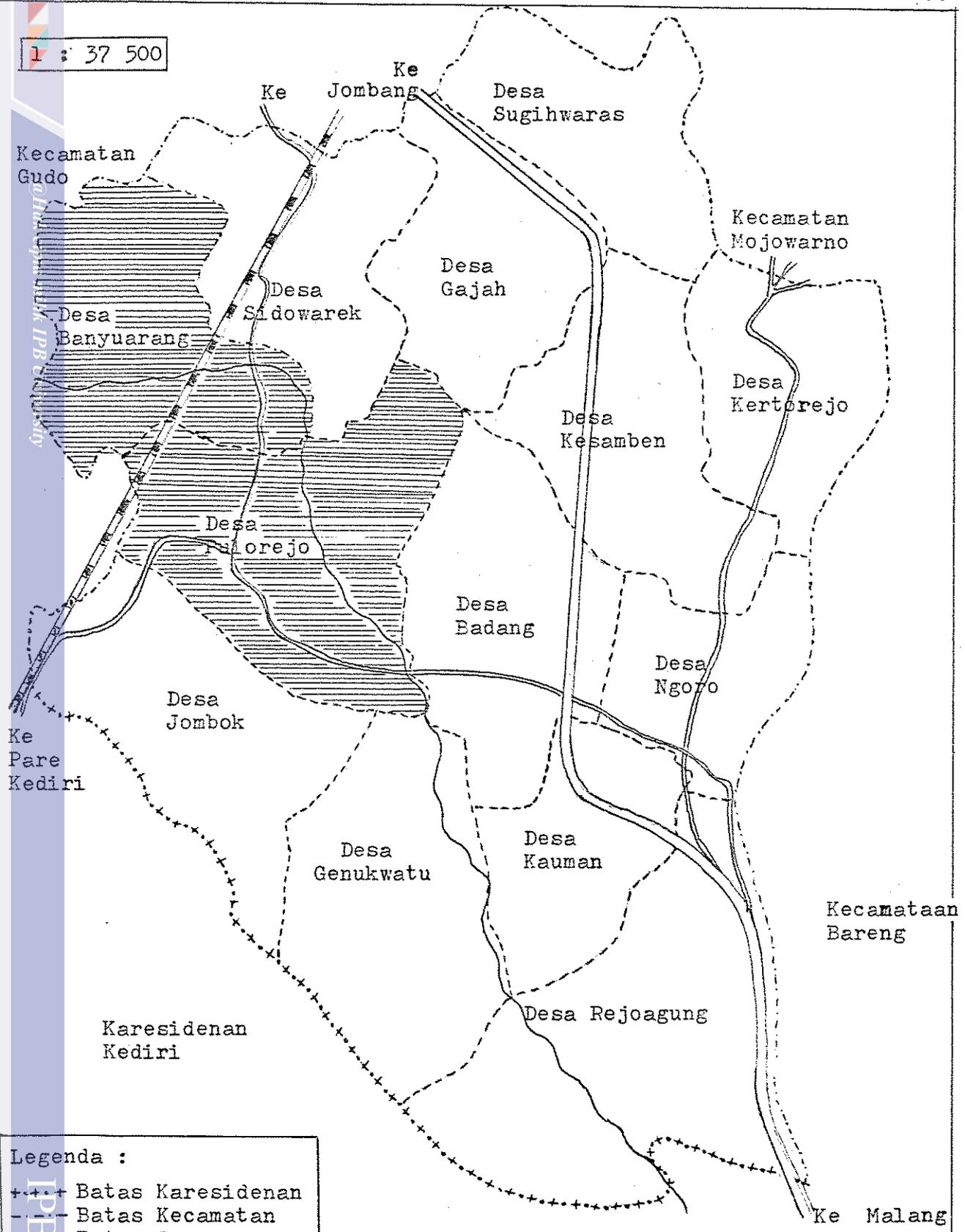
Desa Banyuarang

Desa Banyuarang berjarak lebih kurang 6 km dari ibukota kecamatan ke arah Barat Laut (lihat Gambar 3), dan berjarak lebih kurang 14 km dari ibukota Kabupaten Jombang. Desa ini dilalui jalan raya Jombang - Pare-Kediri dan Jombang - Malang. Karena desa ini dilalui jalan raya maka fasilitas transpor tersedia setiap saat. Disamping adanya transpor umum, penduduk menggunakan alat transpor sendiri, dimana berdasarkan data pada tahun 1983 terdapat sepeda motor sebanyak 35 buah, mobil 1 buah dan sepeda 197 buah. Di Desa Banyuarang tidak terdapat pasar. Pasar terdekat yang buka setiap hari terdapat di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo dan di ibukota Kecamatan Ngoro yang masing-masing berjarak 2.50 km dan 6.00 km. Toko kebutuhan sehari-hari ada 2 buah dan warung ada 4 buah.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa rasio seks di Desa Banyuarang lebih kecil dibandingkan dengan rasio seks di Desa Pulorejo. Demikian pula mengenai kepadatan penduduk di Desa Banyuarang 1.66 kali lebih kecil dari kepadatan penduduk di Desa Pulorejo. Dilihat daya tampung sawah di Desa Pulorejo, dapat dikatakan 1.30 kali daya tampung di Desa Banyuarang.



1 : 37 500



Legenda :

+++++	Batas Karesidenan
- - - - -	Batas Kecamatan
-----	Batas Desa
=====	Jalan Propinsi
=====	Jalan Kabupaten
~~~~~	Sungai
	Desa Penelitian

Gambar 3. Peta Kecamatan Ngoro

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

### Desa Pulorejo

Desa Pulorejo berjarak lebih kurang 4.50 km dari ibukota Kecamatan Ngoro ke arah Barat (lihat Gambar 3) dan berjarak lebih kurang 15 km dari ibukota Kabupaten Jombang. Seperti halnya Desa Banyuarang, desa ini dilewati pula jalan raya yang menghubungkan kota Jombang dengan Malang dan Jombang dengan Pare-Kediri. Fasilitas transportasi tersedia setiap hari akibat adanya jalan raya ini. Alat transportasi sendiri yang dimiliki penduduk adalah sepeda motor sebanyak 115 buah, mobil 16 buah, sepeda 308 buah dan becak sebanyak 2 buah. Di Desa Pulorejo tidak terdapat pasar. Pasar terdekat yang buka setiap hari terdapat di ibukota Kecamatan Ngoro yang berjarak lebih kurang 4.50 km. Kebutuhan sehari-hari disediakan oleh toko-toko sebanyak 8 buah dan kios-kios sebanyak 6 buah. Terdapat pula 2 buah kios yang melayani pembelian sarana produksi dan alat-alat pertanian.

### Penduduk dan Sumber Mata Pencaharian

Penduduk Desa Banyuarang berdasarkan data di kantor desa berjumlah 3 969 orang, dengan rasio seks sebesar 98.00. Kepadatan penduduk di desa ini sebesar 531 orang/km². Dibandingkan dengan kepadatan penduduk di pulau Jawa pada tahun 1980 sebesar 690 orang/km², maka kepadatan penduduk di Desa Banyuarang masih lebih kecil. Kalau dilihat daya tampung sawah sebesar 13.74 orang/ha.



Penduduk Desa Pulorejo berjumlah 4 586 orang dengan rasio seks sebesar 99.82. Kepadatan penduduk di desa ini sebesar 884 orang/km². Angka kepadatan penduduk ini lebih besar daripada kepadatan penduduk di pulau Jawa pada tahun 1980. Adapun daya tampung sawah sebesar 17.73 orang/ha. Untuk melihat perbedaan kepadatan penduduk dan daya tampung sawah di antara dua desa contoh disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983

U r a i a n	Desa Banyuarang	Desa Pulorejo
1. Jumlah penduduk (orang)	3 969	4 592
2. Jumlah penduduk laki-laki (orang)	1 965	2 294
3. Jumlah penduduk perempuan (orang)	2 004	2 298
4. Rasio seks ( <u>Sex Ratio</u> )	98.00	99.82
5. Kepadatan penduduk (orang/km ² )	531	884
6. Daya tampung sawah (orang/ha)	13.74	17.73

Sumber: Kantor desa, 1983 (diolah)

Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, disajikan pada Tabel 2.



Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983

Golongan Umur (tahun)	Desa Banyuarang			Desa Pulorejo		
	Laki-laki	Perempuan	Seluruh penduduk	Laki-laki	Perempuan	Seluruh penduduk
0 - 4	202	198	400	217	209	426
5 - 14	428	448	876	487	469	956
15 - 24	422	426	848	456	463	919
25 - 54	647	656	1 303	909	919	1 828
55 ke atas	266	276	542	225	238	463
<b>J u m l a h</b>	<b>1 965</b>	<b>2 004</b>	<b>3 969</b>	<b>2 294</b>	<b>2 298</b>	<b>4 592</b>

Sumber: Kantor desa, 1983

Analisis mengenai angkatan kerja secara mendalam tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan data yang diperoleh dari kantor desa. Penggolongan angkatan kerja berdasarkan umur, yakni umur 10 - 64 tahun, tidak tersedia. Oleh karena itu perhitungan ukuran dasar angkatan kerja tidak dapat dilakukan. Namun berdasarkan Tabel 2, jika diasumsikan bahwa umur/usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, maka umur/usia kerja dapat dikatakan hampir sama, yakni di Desa Banyuarang sebesar 67.88 persen dan di Desa Pulorejo sebesar 69.90 persen.

Menurut keterangan pamong desa di kedua desa penelitian, migrasi ke kota relatif cukup besar terutama bagi kelompok umur kerja muda (15 - 24 tahun). Kepergian ke kota ini baik sebagai buruh industri, pembantu toko, pedagang kecil, pegawai rendah di instansi pemerintah/perusahaan-perusahaan industri atau bersekolah.

Sebenarnya pembahasan angkatan kerja kurang tepat jika tidak disertai kualitas dari angkatan kerja tersebut. Dengan adanya keterbatasan data, maka kualitas angkatan kerja di kedua desa tersebut hanya dilihat dari segi pendidikan saja, seperti yang terlihat pada Tabel 3.



Tabel 3. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983

Tingkat Pendidikan	Desa Banyuarang		Desa Pulorejo	
	N	%	N	%
Tidak sekolah	575	17.51	515	13.92
Tidak Tamat SD/ sederajat	1 629	49.62	960	25.95
Tamat SD/ sederajat	820	24.98	1 754	47.40
Tamat SLP/ sederajat	215	6.55	425	11.49
Tamat SLA/ sederajat	40	1.22	42	1.13
Tamat akademi/ sederajat	4	0.12	4	0.11
<b>J u m l a h</b>	<b>3 283</b>	<b>100.00</b>	<b>3 700</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Kantor desa, 1983 (diolah)

Angkatan kerja yang tergolong tidak sekolah (buta huruf) sebanyak 17.51 persen di Desa Banyuarang dan 13.92 persen di Desa Pulorejo. Yang tergolong pernah bersekolah SD dan menamatkannya sebesar 74.60 persen di Desa Banyuarang dan 73.35 persen di Desa Pulorejo. Tamatan SLP untuk Desa Banyuarang dan Desa Pulorejo masing-masing sebesar 6.55 persen dan 11.49 persen. Tamatan SLA di kedua desa tersebut, sebesar 1.22 persen di Desa Banyuarang dan 1.13 persen di Desa Pulorejo. Sedangkan untuk tamatan akademi di kedua desa tersebut tidak menunjukkan perbedaan, yakni 0.12 persen untuk Desa Banyuarang dan 0.11 persen untuk Desa Pulorejo.



Keadaan pendidikan yang cukup baik bagi penduduk umur/usia kerja di atas, diduga karena adanya kesadaran yang tinggi akan arti penting pendidikan dan tersedianya fasilitas pendidikan yang cukup memadai di kedua desa atau di sekitar desa tersebut. Sampai dengan tahun 1983 di Desa Banyuarang terdapat prasarana pendidikan yang berupa 3 buah bangunan untuk Sekolah Dasar (SD), 1 buah Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) dan 1 buah Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK). Adapun di Desa Pulorejo terdapat 4 buah bangunan untuk SD dan 1 buah bangunan untuk STK.

Mengenai banyaknya penduduk menurut pekerjaan utama yang dijalankan, disajikan pada Tabel 4. Terlihat bahwa pekerjaan utama yang menduduki urutan pertama adalah buruh tani dan petani sebesar 86.27 persen untuk Desa Banyuarang dan 90.06 persen untuk Desa Pulorejo.



Tabel 4. Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Utama di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983

Jenis Pekerjaan	Desa Banyuarang		Desa Pulorejo	
	N	%	N	%
Petani	506	25.90	611	22.24
Buruh tani	1 170	60.37	1 863	67.82
Pedagang	169	8.72	212	7.72
Pegawai negeri/pamong	35	1.80	24	0.87
Tukang	47	2.24	35	1.27
Buruh industri	8	0.41	t.a.	-
Peternak	7	0.38	2	0.08
<b>J u m l a h</b>	<b>1 938</b>	<b>100.00</b>	<b>2 747</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Kantor desa, 1983

t.a. : tidak ada

#### Tanah Pertanian

Luas tanah di Desa Banyuarang sekitar 377.42 ha. Dari tanah seluas itu yang berupa sawah sekitar 288.80 ha (76.52 persen) dan seluruh tanah sawah tersebut berpengairan teknis. Sedangkan luas tanah di Desa Pulorejo sekitar 519.00 ha. Dari tanah seluas itu yang berupa sawah sekitar 259.00 ha (49.90 persen) dan seluruh tanah sawah tersebut berpengairan teknis. Terlihat bahwa luas tanah sawah di Desa Pulorejo lebih sempit dibandingkan dengan luas sawah di Desa Banyuarang. Mengingat pula jumlah penduduk di Desa Pulorejo lebih besar dibandingkan dengan Desa Banyuarang, dapatlah dimengerti bila daya tampung sawah

di Desa Pulorejo sekitar 1.30 kali daya tampung di Desa Banyuarang. Penggunaan luas tanah desa di dua desa penelitian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Tanah Menurut Penggunaannya di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, 1983

U r a i a n	Desa Banyuarang		Desa Pulorejo	
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
Tanah sawah	288.80	76.82	259.00	49.90
Pekarangan/Perumahan Rakyat	71.61	18.97	102.00	19.65
Ladang/tegalan	15.13	4.00	146.00	28.13
Kuburan	1.88	0.51	8.00	1.54
Lain-lain	-	-	4.00	0.78
J u m l a h	377.42	100.00	519.00	100.00

Sumber: Kantor desa, 1983 (diolah)

Pola tanam di sawah yang umum dilakukan di kedua desa tersebut adalah padi - padi - padi, padi - padi - palawija dan tebu. Produktifitas usahatani padi tanah sawah di Kecamatan Ngoro berkisar 49.51 kuintal gabah kering giling (Kantor Statistik Kabupaten Jombang, 1982). Berdasarkan sumber data yang sama, diketahui bahwa produktifitas jagung, ubikayu, kacang tanah, kedelai berturut-turut sebesar 15.66 kuintal pipilan kering, 236.66 kuintal basah berkulit, 7.17 kuintal glondongan kering dan 6.74 kuintal polong kering.



### Kredit Bimas Padi MT 1982/1983

Petani di kedua desa contoh mengikuti program kredit Bimas padi yang disempurnakan, sejak MT 1970/1971. Pada umumnya petani hanya mengikuti program kredit Bimas padi pada musim penghujan setiap tahunnya. Pada MT 1982/1983, jumlah peserta kredit Bimas padi di Desa Banyuarang sebanyak 61 orang dengan luas areal sawah sebesar 86 hektar. Sedangkan di Desa Pulorejo jumlah peserta kredit Bimas padi sebanyak 76 orang dengan luas areal sawah 100 hektar.

Ditinjau dari sasaran yang ditetapkan, realisasi program kredit Bimas padi di kedua desa contoh lebih kecil dari sasaran. Luas areal sawah yang akan di Bimaskan untuk Desa Banyuarang dan Desa Pulorejo masing-masing sebesar 189 hektar dan 160 hektar. Dengan demikian realisasi program kredit Bimas padi untuk MT 1982/1983 untuk Desa Banyuarang merupakan 45.50 persen dan untuk Desa Pulorejo 62.50 persen dari sasaran yang telah direncanakan. Realisasi kredit Bimas padi di dua desa contoh tersebut adalah lebih besar jika dibandingkan dengan data nasional. Sasaran yang ditetapkan secara nasional untuk sawah yang akan di Bimaskan sebesar 2 380 194 hektar dengan nilai kredit Rp 130.42 milyar, sedangkan realisasinya sebesar 843 504 hektar (35.44 persen) dengan nilai kredit sebesar Rp 45.60 milyar.

Tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi di Desa Banyuarang tergolong baik (79.75 persen) dan di Desa



Pulorejo tergolong jelek (54.71 persen). Persentase ini diperoleh dari perhitungan sisa kredit per Nopember 1983 dibagi dengan jumlah realisasi kredit. Sisa kredit per penunggak di Desa Pulorejo hampir 1.37 kali lebih besar dibandingkan sisa kredit per penunggak di Desa Banyuarang. Untuk melihat perbedaan selanjutnya mengenai keadaan kredit Bimas padi di antara dua desa contoh, disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Keadaan Kredit Bimas Padi MT 1982/1983 di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, Nopember 1983

U r a i a n	Desa Banyuarang	Desa Pulorejo
1. Jumlah peserta Bimas (orang)	61	76
2. Luas areal Bimas (ha)	86	100
3. Rata-rata luas sawah yang di Bimaskan (ha)	1.41	1.32
4. Jumlah realisasi kredit (Rp)	5.848 000.-	7 520 000.-
5. Rata-rata jumlah kredit per hektar (Rp/ha)	68 000.-	75 200.-
6. Sisa kredit per Nopember 1983 (Rp)	1 183 910.-	3 405 200.-
7. Tingkat pembayaran kembali (%)	79.75	54.71
8. Jumlah peserta Bimas TM (orang)	41	34
9. Jumlah peserta Bimas M (orang)	20	42
10. Sisa kredit per penunggak (Rp/orang)	59 195.50	81 076.19

Sumber: Kantor BRI Unit Desa Ngoro, 1983 (diolah)

Rata-rata luas sawah yang di Bimaskan di Desa Banyuarang (1.41 ha) lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata luas sawah yang di Bimaskan di Desa Pulorejo (1.32 ha). Rata-rata jumlah kredit Bimas padi per hektar di Desa Banyuarang sebesar Rp 68 000.- dan di Desa Pulorejo sebesar Rp 75 200.-. Apabila dikaitkan dengan nilai kredit paket A (Rp 63 750.-), paket B (Rp 44 000.-) dan paket C (Rp 77 250.-) yang disediakan oleh BRI Unit Desa Ngoro, maka pada umumnya petani di dua desa contoh tersebut mengambil paket C. Petani tidak mengambil seluruh komponen kredit yang tersedia dalam paket C, karena besarnya kredit yang diambil petani secara bebas dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan petani. Di Desa Banyuarang petani mengambil kredit sebesar 88.02 persen dari paket C, sedangkan di Desa Pulorejo petani mengambil kredit sebesar 97.34 persen dari paket C.

Pada Tabel 7 disajikan realisasi kredit Bimas padi MT 1982/1983 di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo, yang diperinci berdasarkan komponen kredit. Terlihat bahwa petani di Desa Pulorejo tidak mengambil komponen pupuk KCl. Petani di Desa Banyuarang tidak mengambil komponen rodentisida karena di desa tersebut ancaman hama tikus relatif tidak membahayakan.



Tabel 7. Realisasi Kredit Bimas Padi MT 1982/1983 di Desa Banyuarang dan di Desa Pulorejo

	Desa Banyuarang		Desa Pulorejo	
	Fisik	Rupiah	Fisik	Rupiah
1. Pupuk Urea	54 850 kg	2 322 000.-	35 000 kg	3 150 000.-
2. Pupuk TSP	12 900 kg	1 161 000.-	15 000 kg	1 350 000.-
3. Pupuk KCl	4 300 kg	387 000.-	-	-
4. Insektisida:				
Granule (G)	-	-	2 000 kg	800 000.-
Emulsifiable Concentrate (EC)	172 lt	258 000.-	100 lt	150 000.-
5. Rodentisida Klerat	-	-	200 kg	100 000.-
6. Jumlah saprodi	-	4 128 000.-	-	5 550 000.-
7. Biaya Tambahan Intensifikasi (CQL)	-	1 720 000.-	-	1 970 000.-
Jumlah kredit		5 848 000.-		7 520 000.-

Sumber: Kantor Dinas Pertanian Rakyat Kecamatan Ngoro, 1983

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diungkapkan karakteristik petani peminjam, pengaruh faktor karakteristik petani terhadap tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi dan alasan-alasan yang menimbulkan adanya tunggakan kredit Bimas padi.

### Karakteristik Petani Peminjam

Karakteristik petani peminjam kredit Bimas padi dibedakan dengan faktor-faktor yang tergolong faktor non ekonomi dan faktor ekonomi.

### Faktor-Faktor Non Ekonomi

Umur Petani. Distribusi petani bergolongan umur terbesar, yaitu golongan umur 30 - 45 tahun (62.50 persen), kemudian diikuti golongan umur 46 - 55 tahun (32.50 persen). Jumlah yang kecil (5.00 persen) untuk petani bergolongan umur kurang dari 30 tahun dan 2.50 persen untuk umur 56 tahun atau lebih. Berdasarkan hasil ini, maka petani yang tergolong muda (kurang dari 30 tahun) dan tua (56 tahun atau lebih) hanya sebagian kecil, sebagian besar petani tergolong berumur tengahan (30 - 55 tahun).

Umur petani contoh berkisar antara umur 27 tahun, yang terendah, dan 60 tahun, yang tertinggi. Rata-rata umur petani adalah 43.72 tahun (Tabel 8).

Tabel 8. Distribusi Petani Menurut Umur

Golongan Umur (tahun)	Jumlah Petani (N = 40)	Persentase
kurang dari 30	2	5.00
30 - 35	4	10.00
36 - 40	7	17.50
41 - 45	14	35.00
46 - 50	7	17.50
51 - 55	6	15.00
56 atau lebih	1	2.50
<b>J u m l a h</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>

Rata-rata umur petani = 43.72 tahun

Tingkat Pendidikan Petani. Petani yang berpendidikan Sekolah Dasar sebesar 51.00 persen dengan perincian 1 - 3 tahun (15.00 persen) dan 4 - 6 tahun (36.00 persen). Yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama sebesar 10.00 persen, sedangkan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas sebesar 5.00 persen. Petani yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal sebesar 10.00 persen. Dengan demikian 90.00 persen dari petani contoh pernah mengalami pendidikan.

Rata-rata petani berpendidikan selama 5.22 tahun dengan kisaran 0 tahun (terendah) dan 12 tahun (tertinggi).



Tabel 9. Distribusi Petani Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan (tahun)	Jumlah Petani (N = 40)	Persentase
no1	4	10.00
1 - 3	6	15.00
4 - 6	24	36.00
7 - 9	4	10.00
10 - 12	2	5.00
<b>J u m l a h</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>

Rata-rata pendidikan = 5.22 tahun

Tagihan Aktif. Dari 22 petani TM, 20 petani (90.91 persen) merasa pernah ada tagihan aktif dan 2 petani (9.09 persen) merasa tidak adanya tagihan aktif. Sedangkan dari 18 petani M, 3 petani (16.67 persen) merasa pernah ada tagihan aktif dan 15 petani (83.33 persen) merasa tidak adanya tagihan aktif dari petugas. Dengan demikian sebanyak 23 petani dari 40 petani contoh merasa pernah ada tagihan aktif.

Rata-rata frekuensi penagihan dari 23 petani tersebut adalah 1.48 kali. Sedangkan waktu penagihan dapat dibedakan sebelum panen (8.82 persen), sedang panen (23.53 persen) dan setelah panen (67.65 persen). Persentase diukur dari jumlah frekuensi penagihan untuk masing-masing waktu penagihan dibagi dengan seluruh jumlah frekuensi



penagihan. Petugas yang sering melakukan penagihan adalah pegawai BRI Unit Desa (khususnya Mantri Unit Desa) dan pamong desa.

Frekuensi Turut Bimas. Rata-rata frekuensi turut Bimas dari petani contoh sebesar 7 musim tanam dan berkisar antara 1 sampai 13 musim tanam. Tabel 10 menunjukkan bahwa 75.00 persen petani telah mengikuti Bimas antara 3 - 11 musim, 10.00 persen lebih dari 12 musim tanam atau lebih dan 15.00 persen telah mengikuti Bimas selama 2 musim tanam atau kurang.

Tabel 10. Distribusi Petani Menurut Frekuensi Turut Bimas

Frekuensi Turut Bimas (musim tanam)	Jumlah Petani (N = 40)	Persentase
2 atau kurang	6	15.00
3 - 5	9	22.50
6 - 8	14	35.00
9 - 11	7	17.50
12 atau lebih	4	10.00
J u m l a h	40	100.00

Rata-rata frekuensi turut Bimas = 7 musim tanam

Sikap Petani terhadap Pembayaran Kembali. Dari 40 petani contoh, hanya 3 petani saja (7.50 persen) yang bersikap negatif terhadap pembayaran kembali. Setelah ditelusur lebih lanjut, ternyata petani yang bersikap positif



terhadap pembayaran kembali mempunyai alasan tidak setuju terhadap pernyataan:

"Bapak belum melunasi pinjaman yang diterima, karena menganggap bahwa pembayaran kembali itu tidak penting" dan "Bank yang menyalurkan kredit itu merupakan sumber uang yang cukup dan milik Pemerintah, sehingga tidak membayar kembalipun kredit Bimas padi tersebut Bank tetap bisa berjalan". Alasan setuju diungkapkan petani yang bersikap positif terhadap pernyataan: "Bank yang menyalurkan kredit Bimas akan menghentikan pemberian kredit bagi petani penunggak untuk musim tanam berikutnya".

Berdasarkan alasan-alasan yang diungkapkan, ternyata secara umum petani telah merasakan adanya keuntungan ekonomi maupun keuntungan praktis dari program Bimas yang diikutinya.

### Faktor-Faktor Ekonomi

Luas Sawah Garapan yang Dimiliki Petani. Luas sawah garapan yang dimiliki petani contoh bervariasi dari 0.20 sampai 3.00 hektar. Sebagian besar (77.50 persen) mempunyai luas sawah garapan antara 0.51 sampai 1.50 hektar. Sebagian kecil memiliki luas sawah 0.50 hektar atau kurang (15.00 persen) dan 1.51 sampai 2.00 hektar atau lebih (7.50 persen). Rata-rata luas sawah garapan sebesar 1.10 hektar (Tabel 11).



Tabel 11. Distribusi Petani Menurut Luas Sawah Garapan yang Dimilikinya

Luas Sawah (hektar)	Jumlah Petani (N = 40)	Persentase
0.50 atau kurang	6	15.00
0.51 - 1.00	19	47.50
1.01 - 1.50	12	30.00
1.51 - 2.00	2	5.00
2.00 atau lebih	1	2.50
<b>J u m l a h</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>

Rata-rata luas sawah garapan = 1.10 hektar

Produktifitas Usahatani Padi. Produktifitas usahatani padi petani contoh berkisar antara 4.20 sampai 7.00 ton gabah kering panen (gkp). Sebagian besar petani (62.50 persen) mempunyai produktifitas 4.51 sampai 5.50 ton gkp dan 27.50 persen mempunyai produktifitas 5.51 sampai 6.50 ton gkp. Hanya sebagian kecil dari petani yang memiliki produktifitas 4.50 ton gkp atau kurang dan 6.51 ton gkp atau lebih, yang masing-masing besarnya 5.00 persen dari seluruh petani contoh (Tabel 12).

Rata-rata produktifitas usahatani padi sebesar 5.35 ton gkp dan simpangan bakunya (standard deviation) adalah 0.69. Simpangan baku yang kecil ini menunjukkan bahwa produktifitas yang dicapai petani hampir homogen. Hal ini disebabkan karena penerapan Panca Usahatani hampir sama

tingkatannya di setiap usahatani padi dan ditunjang dengan situasi alam yang baik.

Tabel 12. Distribusi Petani Menurut Produktifitas Usahatani Padi

Produktifitas (ton gkp)	Jumlah Petani (N = 40)	Persentase
4.50 atau kurang	2	5.00
4.51 - 5.00	16	40.00
5.01 - 5.50	9	22.50
5.51 - 6.00	4	10.00
6.01 - 6.50	7	17.50
6.51 atau lebih	2	5.00
<b>J u m l a h</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>

Rata-rata produktifitas usahatani padi = 5.35 ton gkp

Pendapatan Total Petani. Rata-rata pendapatan usahatani padi per hektar yang dihitung berdasarkan konsep Return to land and family labor sebesar Rp 347 542.55 dengan variasi antara Rp 259 350.00 (terendah) dan Rp 515 150.00 (tertinggi). Simpangan baku yang tinggi sebesar 73 251.15 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan usahatani padi per hektar antara petani contoh sangat heterogen. Keadaan ini disebabkan oleh perbedaan tingkat harga yang diterima di tingkat petani dan biaya-biaya yang dikeluarkan bagi keperluan usahatani padi.

Rata-rata pendapatan total petani per tahun sebesar Rp 1 034 612.50, yang terdiri dari rata-rata pendapatan



usahatani padi Rp 662 069.13 dan rata-rata pendapatan di luar usahatani (off-farm income) sebesar Rp 372 543.37.

Dengan demikian pendapatan usahatani padi menyumbang sebesar 63.99 persen dan pendapatan di luar usahatani padi sebesar 36.01 persen terhadap pendapatan total.

Sumber pendapatan di luar usahatani padi meliputi palawija, tebu, buah-buahan, ternak, upah buruh, usaha dagang dan gaji.

Jumlah Beban Keluarga. Lima puluh dua setengah persen (52.50 persen) petani mempunyai beban keluarga sebesar 4 - 7 orang. Dua puluh persen (20.00 persen) mempunyai beban 2 - 3 orang dan 27.50 persen dengan beban sebesar 8 orang atau lebih. Rata-rata jumlah beban keluarga petani contoh sebesar 5.40 orang dengan kisaran antara 2 orang (terendah) dan 9 orang (tertinggi), seperti terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Distribusi Petani Menurut Jumlah Beban Keluarga

Beban Keluarga (orang)	Jumlah Petani (N = 40)	Persentase
2 - 3	8	20.00
4 - 5	12	30.00
6 - 7	9	22.50
8 atau lebih	11	27.50
<b>J u m l a h</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>

Rata-rata jumlah beban keluarga = 5.40 orang

## Pengaruh Faktor Karakteristik Petani terhadap Tingkat Pembayaran Kembali

### Umur Petani

Dari Tabel 14, ternyata petani TM sebesar 55.00 persen dari seluruh petani contoh dan petani M sebesar 45.00 persen dari seluruh petani contoh. Jika dilihat pada setiap golongan umur maka petani berumur rendah mempunyai tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing 61.11 persen dan 38.88 persen. Sedangkan petani berumur tinggi mempunyai tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing 50.00 persen. Berdasarkan data ini, faktor umur petani tidak mempunyai hubungan yang teratur dengan tingkat pembayaran kembali.

Dengan  $X^2 = 0.29$  tidak mencukupi syarat untuk menolak hipotesis nol. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa faktor umur petani tidak ada hubungan yang nyata dengan tingkat pembayaran kembali. Nilai koefisien korelasi Cramer-nya juga rendah ( $C = 0.09$ ).



Tabel 14. Hubungan Antara Golongan Umur dan Tingkat Pembayaran Kembali

Umur Petani (tahun)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Rendah ( $\leq 43.72$ )	11	61.11	7	38.88	18	100.00
Tinggi ( $> 43.72$ )	11	50.00	11	50.00	22	100.00
<b>J u m l a h</b>	22	55.00	18	45.00	40	100.00

$$X^2 = 0.29, dk = 1, p = 0.05 \text{ (tidak nyata), } C = 0.09$$

#### Tingkat Pendidikan Petani

Dilihat pada setiap golongan tingkat pendidikan maka petani berpendidikan rendah mempunyai tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing sebesar 50.00 persen. Sedangkan petani berpendidikan tinggi mempunyai tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing sebesar 60.00 persen dan 40.00 persen (Tabel 15).

Hasil uji statistik tidak cukup untuk menolak hipotesis nol karena  $X^2 = 0.40$  dan nilai  $C$  nya juga rendah. Dengan demikian faktor tingkat pendidikan petani tidak ada hubungan yang nyata dengan tingkat pembayaran kembali.



Tabel 14. Hubungan Antara Golongan Umur dan Tingkat Pembayaran Kembali

Umur Petani (tahun)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Rendah ( $\leq 43.72$ )	11	61.11	7	38.88	18	100.00
Tinggi ( $> 43.72$ )	11	50.00	11	50.00	22	100.00
<b>J u m l a h</b>	22	55.00	18	45.00	40	100.00

$$X^2 = 0.29, dk = 1, p = 0.05 \text{ (tidak nyata), } C = 0.09$$

#### Tingkat Pendidikan Petani

Dilihat pada setiap golongan tingkat pendidikan maka petani berpendidikan rendah mempunyai tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing sebesar 50.00 persen. Sedangkan petani berpendidikan tinggi mempunyai tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing sebesar 60.00 persen dan 40.00 persen (Tabel 15).

Hasil uji statistik tidak cukup untuk menolak hipotesis nol karena  $X^2 = 0.40$  dan nilai  $C$  nya juga rendah. Dengan demikian faktor tingkat pendidikan petani tidak ada hubungan yang nyata dengan tingkat pembayaran kembali.

Tabel 15. Hubungan Antara Golongan Tingkat Pendidikan Petani dan Tingkat Pembayaran Kembali

Pendidikan Petani (tahun)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Rendah ( $\leq 5.22$ )	10	50.00	10	50.00	20	100.00
Tinggi ( $> 5.22$ )	12	60.00	8	40.00	20	100.00
<b>J u m l a h</b>	<b>22</b>	<b>55.00</b>	<b>18</b>	<b>45.00</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>

$$X^2 = 0.40, dk = 1, p = 0.05 \text{ (tidak nyata), } C = 0.10$$

#### Tagihan Aktif

Petani TM yang merasa pernah ada tagihan aktif (ATA) sebesar 20 orang dan petani M sebesar 2 orang. Sedangkan petani TM yang merasa tidak pernah ada tagihan aktif oleh petugas (TATA) sebesar 3 orang dan petani M sebesar 15 orang (Tabel 16). Terlihat bahwa ada hubungan yang teratur antara tagihan aktif dengan tingkat pembayaran kembali.

Hasil uji statistik cukup untuk menolak hipotesis nol karena  $X^2 = 22.32$  (lebih besar dari  $X^2_{\text{tabel}}$ ). Dapat disimpulkan bahwa faktor tagihan aktif berpengaruh nyata dengan taraf kepercayaan 99 persen dan hubungan antara keduanya kuat ( $C = 0.60$ ).

Adanya pendekatan langsung yang dilakukan oleh petugas sangat berperan pada tingkat pembayaran kembali. Waktu yang tepat untuk tagihan aktif menurut petani (91.30

persen) adalah pada waktu sedang panen dan sesudah panen. Menurut petugas yang diwawancarai, tagihan aktif dapat mengingatkan petani akan kewajiban kontrak (contractual obligation). Cara yang dilakukan petugas kepada petani untuk mengingatkan kewajibannya dengan jalan memberikan pengertian bahwa jika petani melunasi kreditnya maka akan mendapat kredit untuk musim tanam berikutnya, memberikan pengertian bahwa kewajiban membayar kembali menyangkut nama baik (reputasi) petani dan dapat dijadikan teladan bagi yang lain. Disamping cara-cara yang lunak berupa peringatan kepada petani, ada pula cara yang bersifat paksaan yang diresdusi Bupati berdasarkan Surat Nomor : EK.011/205/1982 (lihat, Lampiran 4) yang dikaitkan dengan pelaksanaan Inpres 10/1981. Isi surat tersebut menyatakan jika petani peserta program TRI yang mempunyai tunggakan kredit Bimas padi, agar bagi hasil atau penerimaan COL-nya dipotong untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, World Bank (1974) menunjukkan pula bahwa faktor tagihan aktif dapat mempererat hubungan antara petani dengan petugas sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tunggakan kredit.



Tabel 16. Hubungan Ada/Tidak Adanya Tagihan Aktif (ATA/TATA) dan Tingkat Pembayaran Kembali

ATA/TATA	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
ATA	20	89.96	3	10.04	23	100.00
TATA	2	2.00	15	98.00	17	100.00
J u m l a h	22	55.00	18	45.00	40	100.00

$$\chi^2 = 22.32, dk = 1, p = 001 \text{ (nyata)}, C = 0.60$$

#### Frekuensi Turut Bimas

Tingginya frekuensi turut Bimas dapat mencerminkan bahwa petani telah merasa manfaat, baik dari segi ekonomi maupun praktis. Dengan demikian faktor frekuensi turut Bimas diharapkan berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali.

Dari Tabel 17, petani yang mempunyai frekuensi rendah menunjukkan tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing sebesar 18.75 persen dan 81.25 persen. Sedangkan petani yang mempunyai frekuensi tinggi menunjukkan tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing sebesar 79.17 persen dan 20.83 persen. Terlihat adanya hubungan yang teratur antara frekuensi turut Bimas dengan tingkat pembayaran kembali.

Hasil uji statistik cukup untuk menolak hipotesis nol dengan taraf kepercayaan 99 persen dan keeratan hubungan

yang kuat ditunjukkan oleh kedua peubah tersebut ( $C = 0.51$ ). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa frekuensi turut Bimas berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali. Semakin lama petani mengikuti program kredit Bimas maka semakin baik pula tingkat pembayaran kembali kredit yang diterimanya.

Tabel 17. Hubungan Antara Golongan Frekuensi Turut Bimas dan Tingkat Pembayaran Kembali

Frekuensi Turut Bimas (musim tanam)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Rendah ( $\leq 7$ )	3	18.75	13	81.25	16	100.00
Tinggi ( $> 7$ )	19	79.17	5	20.83	24	100.00
J u m l a h	22	55.00	18	45.00	40	100.00

$$\chi^2 = 14.14, dk = 1, p = 0.001 \text{ (nyata)}, C = 0.51$$

#### Sikap Petani terhadap Pembayaran Kembali Kredit Bimas

Menurut hasil penelitian dari 40 petani contoh, ternyata 37 petani (92.50 persen) bersikap positif terhadap pembayaran kembali, dengan perincian 20 petani TM dan 17 petani M. Hanya 3 orang petani (7.50 persen) dari seluruh petani contoh bersikap negatif (Tabel 18).

Dari hasil uji statistik diperoleh  $\chi^2$  sebesar 0.16. Nilai ini tidak cukup untuk menolak hipotesis nol dengan taraf kepercayaan 95 persen. Antara sikap dan tingkat pembayaran kembali terdapat hubungan yang lemah ( $C = 0.06$ ).

Tabel 18. Hubungan Antara Golongan Sikap Petani dan Tingkat Pembayaran Kembali

Sikap Petani	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Positif	20	54.05	17	45.95	37	100.00
Negatif	2	66.67	1	33.33	3	100.00
J u m l a h	22	55.00	18	45.00	40	100.00

$$X^2 = 0.16, dk = 1, p = 0.05 \text{ (tidak nyata), } C = 0.06$$

Walaupun sebagian besar petani bersikap positif, tetapi sikap demikian ternyata tidak terwujud dalam tindakannya. Keadaan ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh di luar diri petani, misalnya besarnya daya tarik barang-barang baru yang diakibatkan oleh efek demonstrasi (demonstration effect) dan faktor lingkungan yang tidak mendukung. Faktor lingkungan yang dimaksudkan adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang karena melihat orang lain tidak berbuat, misalnya ada seorang petani yang dapat digolongkan pimpinan di masyarakat tani tersebut tidak membayar kredit. Petani lainnya ikut bersikap serupa dengan tokoh tersebut dengan dalih: "Kalau ditangkap oleh pihak yang berwajib karena tidak membayar kredit, tentunya dia dahulu yang kena". Alasan lain yang diungkapkan petani contoh adalah: "Uang yang seharusnya digunakan untuk mengembalikan kredit digunakan lebih dahulu untuk kebutuhan



keluarga yang mendesak, misalnya untuk ongkos berobat bagi yang sakit atau adanya kecelakaan lain yang menimpa keluarga".

#### Luas Sawah Garapan yang Dimiliki Petani

Dari Tabel 19, petani bergolongan luas sawah yang sempit menunjukkan tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing sebesar 62.50 persen dan 37.50 persen. Sedangkan petani bergolongan luas sawah luas menunjukkan tingkat pembayaran kembali TM dan M, masing-masing 43.75 persen dan 56.25 persen (Tabel 19).

Hasil uji statistik dengan taraf kepercayaan 95 persen tidak cukup untuk menolak hipotesis nol karena  $X^2 = 1.36$ . Terdapat hubungan yang lemah antara luas sawah garapan dengan tingkat pembayaran kembali ( $C = 0.18$ ). Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang nyata antara luas sawah garapan dengan tingkat pembayaran kembali.

Tabel 19. Hubungan Antara Golongan Luas Sawah Garapan yang Dimiliki Petani dan Tingkat Pembayaran Kembali

Sawah Garapan (hektar)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Luas ( $\leq 1.10$ )	15	62.50	9	37.50	24	100.00
Sempit ( $> 1.10$ )	7	43.75	9	56.25	16	100.00
Jumlah	22	55.00	18	45.00	40	100.00

$X^2 = 1.36$ , dk = 1, p = 0.05 (tidak nyata), C = 0.18

### Produktifitas Usahatani Padi

Dari Tabel 20, terlihat bahwa petani bergolongan produktifitas rendah menunjukkan tingkat pembayaran kembali TM sebesar 48.15 persen dan M sebesar 51.85 persen. Sedangkan petani bergolongan produktifitas tinggi menunjukkan 69.23 persen dan 30.77 persen untuk tingkat pembayaran kembali TM dan M. Berdasarkan Tabel 20 terlihat pula bahwa antara produktifitas usahatani padi dan tingkat pembayaran kembali tidak terdapat hubungan yang teratur.

Hasil uji statistik dengan  $X^2 = 1.57$  tidak cukup untuk menolak hipotesis nol. Apalagi diperoleh hubungan yang lemah antara faktor produktifitas usahatani padi dengan tingkat pembayaran kembali ( $C = 0.19$ ).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor produktifitas usahatani padi tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pembayaran kembali.

Tabel 20. Hubungan Antara Golongan Produktifitas Usahatani Padi dan Tingkat Pembayaran Kembali.

Produktifitas (ton/gkp)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Rendah ( $\leq 5.35$ )	13	48.15	14	51.85	27	100.00
Tinggi ( $> 5.35$ )	9	69.23	4	30.77	13	100.00
J u m l a h	22	55.00	18	45.00	40	100.00

$$X^2 = 1.57, dk = 1, p = 0.05 \text{ (tidak nyata), } C = 0.19$$



### Pendapatan Total Petani

Dari Tabel 21, diperoleh keterangan bahwa petani yang mempunyai pendapatan total rendah menunjukkan 55.17 persen mempunyai tingkat pembayaran kembali yang tergolong TM dan 47.83 persen tergolong M. Sedangkan petani yang mempunyai pendapatan total tinggi menunjukkan 58.82 persen mempunyai tingkat pembayaran kembali yang tergolong TM dan 41.18 persen tergolong M. Terlihat bahwa antara faktor pendapatan total petani dan tingkat pembayaran kembali tidak mempunyai hubungan yang teratur.

Berdasarkan hasil uji statistik,  $\chi^2 = 0.16$  tidak cukup untuk menolak hipotesis nol dengan taraf kepercayaan 95 persen. Hubungan antara keduanya lemah juga ( $C = 0.06$ ). Dapat dikatakan bahwa faktor pendapatan total petani tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali.

Tabel 21. Hubungan Antara Golongan Pendapatan Total Petani dan Tingkat Pembayaran Kembali

Pendapatan Total (rupiah)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Rendah ( $\leq 1\ 034\ 612.50$ )	12	52.17	11	47.83	23	100.00
Tinggi ( $> 1\ 034\ 612.50$ )	10	58.82	7	41.18	17	100.00
J u m l a h	22	55.00	17	45.00	40	100.00

$\chi^2 = 0.16$ , dk = 1, p = 0.05 (tidak nyata), C = 0.06

Upaya untuk mencari hubungan antara pendapatan dari usahatani padi dan pendapatan dari luar usahatani padi yang merupakan komponen pendapatan total, disajikan dalam Tabel 22 dan Tabel 23. Dari Tabel 22 dan Tabel 23, ternyata diperoleh hasil bahwa pendapatan dari usahatani padi dan pendapatan dari luar usahatani padi tidak mempengaruhi secara nyata terhadap tingkat pembayaran kembali kredit Bimas padi dengan taraf kepercayaan sebesar 95 persen.

Tabel 22. Hubungan Antara Golongan Pendapatan Usahatani Padi dan Tingkat Pembayaran Kembali

Pendapatan Usahatani Padi (rupiah)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Rendah ( $\leq 662\ 069.13$ )	11	55.00	9	45.00	20	100.00
Tinggi ( $> 662\ 069.13$ )	11	55.00	9	45.00	20	100.00
<b>J u m l a h</b>	22	55.00	18	45.00	20	100.00

$$\chi^2 = 0, dk = 1, p = 0.05 \text{ (tidak nyata), } C = 0$$



Tabel 23. Hubungan Antara Golongan Pendapatan dari Luar Usahatani Padi dan Tingkat Pembayaran Kembali

Pendapatan dari Luar Usahatani Padi (rupiah)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Rendah ( $\leq 372.543.38$ )	11	47.82	12	52.18	23	100.00
Tinggi ( $> 372.543.38$ )	11	64.71	6	35.29	17	100.00
J u m l a h	22	55.00	18	45.00	40	100.00

$$X^2 = 1.12, dk = 1, p = 0.05 \text{ (tidak nyata), } C = 0.06$$

#### Jumlah Beban Keluarga

Petani bergolongan jumlah beban keluarga yang kecil menunjukkan tingkat pembayaran kembali yang tergolong TM dan M, masing-masing sebesar 75.00 persen dan 25.00 persen. Sedangkan petani yang bergolongan jumlah beban keluarga yang besar menunjukkan tingkat pembayaran kembali yang tergolong TM sebesar 35.00 persen dan M sebesar 65.00 persen (Tabel 24).

Dengan uji statistik diperoleh hasil, bahwa  $X^2$  sebesar 6.46 cukup untuk menolak hipotesis nol dengan taraf kepercayaan 95 persen. Antara jumlah beban keluarga dengan tingkat pembayaran kembali menunjukkan hubungan yang kuat ( $C = 0.37$ ).

Karena jumlah beban keluarga digunakan sebagai indikator jumlah pengeluaran keluarga, maka akibatnya faktor

pengeluaran keluarga berpengaruh nyata dengan tingkat pembayaran kembali. Indikator ini didasarkan karena jumlah beban keluarga sangat erat dengan besarnya pengeluaran untuk kebutuhan konsumtif. Adanya dugaan bahwa efek demonstrasi cukup besar di lokasi penelitian, sangat mendukung hasil penelitian ini. Alasan lain yang mendukung bahwa faktor jumlah beban keluarga (pengeluaran keluarga) berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali adalah adanya rasio beban tanggungan (dependency ratio) sebesar 0.69. Angka rasio ini berarti bahwa setiap 100 orang yang produktif harus menanggung 69 orang yang tidak produktif.

Tabel 24. Hubungan Antara Golongan Jumlah Beban Keluarga dan Tingkat Pembayaran Kembali

Jumlah Beban Keluarga (orang)	Tingkat Pembayaran Kembali				Jumlah	
	TM		M		N	%
	N	%	N	%		
Kecil ( $\leq 5.40$ )	15	75.00	5	25.00	20	100.00
Besar ( $> 5.40$ )	7	35.00	13	65.00	20	100.00
J u m l a h	22	55.00	18	45.00	40	100.00

$$X^2 = 6.46, dk = 1, p = 0.05 \text{ (nyata)}, C = 0.37$$

#### Alasan-Alasan Tentang Terjadinya Tunggakan

Alasan-alasan tentang terjadinya tunggakan kredit dibedakan menjadi enam golongan, yakni (1) sikap petani, (2) untuk membayar hutang lain, (3) hasil padinya telah

dijual sebelum panen (ijon), (4) digunakan untuk usahatani lain bagi keluarga petani, (5) perbaikan rumah/sepeda motor, dan (6) kecerobohan dalam pengembalian.

Adapun jenis alasan, jumlah alasan dan persentasenya, disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Alasan-Alasan Tentang Terjadinya Tung-  
gakan oleh 18 Petani Penunggak

Jenis Alasan	N	Persentase
1. Sikap petani: "Karena orang lain juga belum mengembalikan kreditnya, sekalipun saya mampu".	4	22.22
2. Untuk membayar hutang lain	3	16.67
3. Hasil padinya telah dijual sebelum panen (ijon)	1	5.55
4. Digunakan untuk kebutuhan lain bagi keperluan keluarga Biaya pendidikan Biaya memasukkan anak ke sekolah Biaya pengobatan Biaya pesta perkawinan/khitanan	7	39.90
5. Perbaikan rumah/sepeda motor	2	11.11
6. Kecerobohan dalam pengembalian Melalui pamong desa dan tidak disetorkan ke BRI UD Ngoro	1	5.55
<b>J u m l a h</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 40 petani contoh, diperoleh karakteristik petani peminjam kredit Bimas padi sebagai berikut:

1. Rata-rata umur petani adalah 43.72 tahun dengan kisaran umur antara 27 sampai 60 tahun. Sebagian besar petani termasuk golongan umur tengahan.
2. Rata-rata petani berpendidikan formal 5.22 tahun dengan kisaran lama pendidikan antara 0 sampai 12 tahun. Sebagian besar petani termasuk golongan lama pendidikan 1 sampai 6 tahun.
3. Petani yang merasa adanya tagihan aktif dari petugas sebanyak 23 petani (57.50 persen) dan yang merasa tidak pernah ada tagihan aktif sebanyak 17 petani (42.50 persen). Rata-rata frekuensi penagihan 1.48 kali. Sedangkan waktu penagihan sebagian besar dilaksanakan setelah panen.
4. Rata-rata frekuensi turut Bimas adalah 7 musim tanam dengan kisaran antara 1 sampai 13 musim tanam. Pada umumnya petani hanya mengikuti program kredit Bimas pada waktu musim penghujan.
5. Hanya 3 petani dari 40 petani contoh (7.50 persen) yang bersikap negatif terhadap pembayaran kembali.
6. Rata-rata luas sawah garapan yang dimiliki petani adalah 1.10 hektar dengan kisaran luas antara 0.20 sampai

3.00 hektar. Sebagian besar petani mempunyai golongan luas sawah garapan 0.51 sampai 1.50 hektar.

7. Rata-rata produktifitas usahatani padi sebesar 5.35 ton gabah kering panen dengan kisaran antara 4.20 sampai 7.00 ton gkp. Simpangan baku yang rendah (0.60) menunjukkan bahwa produktifitas usahatani padi di daerah penelitian hampir seragam (homogenous).
8. Rata-rata pendapatan total yang diperoleh petani setiap tahunnya adalah Rp 1 034 612.50. Pendapatan usahatani padi menyumbang sebesar 63.99 persen dan pendapatan dari luar usahatani padi sebesar 36.01 persen terhadap pendapatan total petani.
9. Rata-rata jumlah beban keluarga adalah 5.40 orang dengan kisaran antara 2 sampai 9 orang.

Upaya untuk mencari hubungan antara faktor karakteristik petani dengan tingkat pembayaran kembali, yang dilakukan dengan uji statistik Kai Kuadrat dengan taraf kepercayaan minimal 95 persen memperoleh hasil sebagai berikut:

10. Faktor-faktor non ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali adalah tagihan aktif dan frekuensi turut Bimas.
11. Faktor ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap tingkat pembayaran kembali hanyalah faktor jumlah beban keluarga yang digunakan sebagai indikator pengeluaran keluarga.

Alasan-alasan yang diungkapkan petani tentang terjadinya tunggakan kredit Bimas dapat digolongkan menjadi enam golongan alasan, yakni: (1) sikap petani yang sengaja tidak mengembalikan kredit yang pernah diterimanya, (2) digunakan untuk membayar hutang lain, (3) hasil padinya sudah dijual sebelum panen (ijon), (4) digunakan untuk kebutuhan atau keperluan lain, (5) digunakan untuk perbaikan rumah/sepeda motor, dan (6) kecerobohan dalam pengembalian.

#### Saran-Saran

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali adalah tagihan aktif, frekuensi turut Bimas dan jumlah beban keluarga. Apabila ketiga faktor tersebut digunakan untuk menilai kelayakan bagi petani untuk menerima kredit (credit worthiness), maka hanya dua faktor yang dapat digunakan, yakni faktor frekuensi turut Bimas dan jumlah beban keluarga. Kedua faktor ini dapat diketahui sebelum petani menerima kredit. Sedangkan faktor tagihan aktif merupakan tugas dari petugas-petugas yang menangani kredit Bimas (khususnya Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan/Desa) dan dilakukan setelah petani menerima kredit tersebut.

Adanya faktor frekuensi turut Bimas dan jumlah beban keluarga yang mempengaruhi tingkat pembayaran kembali, berimplikasi bahwa untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tunggakan, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan.



Faktor frekuensi turut Bimas dan jumlah beban keluarga harus dipertimbangkan sebagai syarat dalam pemilihan calon petani peminjam kredit Bimas atas kelayakannya.

Karena jumlah keluarga berkaitan erat dengan pengeluaran keluarga, maka adanya pengaruh faktor tersebut terhadap tingkat pembayaran kembali perlu dikaitkan pula dengan bimbingan penggunaan kredit. Bimbingan penggunaan kredit tersebut dimaksudkan agar kredit yang diterima petani digunakan untuk keperluan produktif sehingga pendapatannya kian meningkat, dan setelah panen dana yang diperoleh dari kelebihan produksi (surplus produksi) jangan digunakan untuk keperluan konsumtif, melainkan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran kembali kredit yang pernah diterimanya.

Untuk mengetahui keadaan petani, khususnya mengenai frekuensi turut Bimas dan jumlah beban keluarga, maka perlu diperhatikan kembali Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 044/SK.I/MENTAN/BPB/78 tanggal 31 Oktober 1978. Keputusan tersebut berisi ketentuan bahwa bagi petani peserta kredit Bimas harus memiliki dan menggunakan Buku Keterangan Peserta Bimas, yang lebih dikenal dengan Buku Kuning. Pengalaman di daerah penelitian, Buku Kuning tersebut sangat jarang dipergunakan.

Penagihan secara aktif oleh petugas sangat berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali. Hal ini membuktikan bahwa pengenalan secara langsung antara petugas dengan



petani dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tunggakan kredit oleh petani. Berkaitan dengan tagihan aktif ini, Kuntjoro (1983) mengusulkan penambahan bagi kelengkapan administrasi yang berupa:

1. Peta situasi yang menggambarkan letak tempat tinggal peserta Bimas dengan membuat rayon-rayon terkecil sekitar 15 - 25 petani, sehingga mudah dikenal.
2. Peta situasi yang menggambarkan lokasi persawahan menurut hamparan sawah berdasarkan blok-blok tertier persawahan dengan perincian petak-petak sawah bernomor urut persil yang menunjukkan letak sawah peserta Bimas, baik petani pemilik atau penggarap bagi hasil, dilengkapi dengan nama masing-masing.

Ide tersebut sebenarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Buku Keterangan Peserta Bimas (Buku Kuning) yang berisikan data pemilik tanah atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik tanah, penggarap dan identitas tanah (nomor petak, nomor persil, nomor Letter C, blok, macam dan kelas tanah beserta luasnya) yang diikutsertakan dalam program Bimas serta riwayat pinjamannya.

Sebelum ditemukan cara-cara yang efektif untuk melaksanakan tagihan aktif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah penelitian, maka cara-cara penagihan aktif dapat berpedoman pada Petunjuk Presiden mengenai Bimas Pola Nganjuk (lihat Lampiran 5).



Dengan demikian disarankan untuk meneliti secara mendalam mengenai bentuk tagihan aktif yang sebaiknya dilaksanakan di daerah penelitian.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Rakyat Indonesia. 1982. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bimas MT 1982/1983. Kantor Besar BRI. Jakarta.
- _____. 1983. Kebijakan dan Prosedure Kredit Bank Rakyat Indonesia. Kantor Besar BRI. Jakarta.
- _____. 1984. Peranan BRI dan Menurunnya Penyaluran Kredit Bimas. Kantor Besar BRI. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. 1983. Buku Saku Statistik Indonesia 1982/1983. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Blalock, H.M. 1981. Social Statistics, Revised Second Edition. Mc. Graw-Hill International Book Company. Tokyo.
- Departemen Pertanian. 1983. Rencana Pembangunan Lima Tahun IV. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Djarwanto. 1982. Statistik Sosial Ekonomi, Eagian Pertama. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Hunter, Guy. 1971. Modernizing Peasant Societies: A Comparative Study in Asia and Africa.
- Kantor Statistik Kabupaten Jombang. 1983. Jombang Dalam Angka. Kantor Statistik Kabupaten Jombang. Jombang.
- Karim, Anwarul, A.M. 1976. Profile and Loan Repayment Behaviour of Small Rice Farmer - Members of Samahang Nayong in Laguna Provinsi, Republic of the Philippines. Ph.D. Thesis. University of the Philippines. Los Banos.
- Koentjaraningrat. 1964. Pembangunan Masyarakat Desa. Yayasan Idayu, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kuntjoro. 1980. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat dan Perilaku Pembayaran Kembali Kredit Pertanian pada Petani di Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat. Usulan Penelitian Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.



- Kuntjoro. 1983. Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi, Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Disertasi Doktor. Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Lunandi, A.G. 1981. Pendidikan Orang Dewasa. Gramedia. Jakarta.
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. 1978. Surat Keputusan Nomor 044/SK I/MENTAN/BPB/78, Tentang Penetapan Bentuk dan Berlakunya Buku Keterangan Peserta Bimas. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Mosher, A.T. 1966. Getting Agricultural Moving, Essentials for Development and Modernization. Frederick A. Praeger (Publisher). New York.
- Presiden Republik Indonesia. 1977. Petunjuk Presiden Republik Indonesia Nomor B.30/Pres/6/1977, Tentang Pelaksanaan Bimas dan Masalah Pengembalian Kredit Bimas.
- Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang. 1982. Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Padi, Palawija dan Sayuran di Jombang. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang. Jombang.
- Satuan Pengendali Bimas. 1983. Buku Petunjuk serta Materi Peningkatan Penyuluhan dan Penerangan dalam Perkredit-an Indonesia. Satuan Pengendali Bimas. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1982. Metoda Penelitian Survei. LP₃ES. Jakarta.
- Team Aceh. 1975. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bimas Padi oleh Petani pada MT 1983/1984 di Kabupaten Aceh Besar, Daerah Istimewa Aceh. Kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Aceh dengan Universitas Syah Kuala. Aceh.
- Team Survey Universitas Gajah Mada. 1972. Pelaksanaan Kredit Bimas dan Aspek-Aspeknya serta Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan dan Produksi Padi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 1970 - 1972. Kerjasama Bank Indonesia dan LPEFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.



Team Universitas Parahyangan. 1972. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bimas MT 1972/1973 di Lima Kabupaten Jawa Barat. Universitas Parahyangan. Bandung.

The World Bank. 1974. Agricultural Credit. The World Bank Paper. Rural Development Series. August.

_____. 1975. Agricultural Credit. Sector Policy Paper. World Bank. Washington, DC.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

## LAMPIRAN

小  
学  
部



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 1. Perkembangan Penyaluran dan Pengembalian Kredit Bimas Padi per Musim Tanam, Januari 1984

No.	Musim Tanam	Target Areal	Realisasi				Pembayaran Kembali	Sisa Kredit		
			Areal Ha	%	Petani	Kredit Rp		Rp	%	
BIMAS PADI										
1.	MT 1970/1971	1.114.571	1.008.614	89.7	1.326.714	8.454.655	55.0	8.170.056	284.599	3.4
2.	MT 1971	462.000	296.303	64.1	356.607	2.508.941	44.4	2.367.942	140.999	5.6
3.	MT 1971/1972	1.311.057	890.706	67.9	1.181.778	7.306.117	43.9	7.090.238	215.879	3.0
4.	MT 1972	522.500	307.820	58.9	336.654	2.558.494	37.7	2.409.441	149.053	5.8
5.	MT 1972/1973	1.424.500	1.379.755	96.8	1.714.733	12.772.348	78.5	12.146.530	625.818	5.0
6.	MT 1973	555.290	487.047	87.7	548.684	4.942.043	74.2	4.621.754	320.289	6.0
7.	MT 1973/1974	2.257.000	2.122.514	94.0	2.558.242	31.550.210	76.5	28.955.084	2.595.126	8.2
8.	MT 1974	949.350	813.315	85.7	987.704	12.537.608	71.5	11.223.857	1.313.751	10.4
9.	MT 1974/1975	2.461.000	2.170.778	88.4	2.615.451	40.558.848	69.9	37.054.707	3.313.751	8.6
10.	MT 1975	1.060.500	886.529	84.9	1.104.904	17.214.042	68.9	14.739.533	2.474.509	14.3
11.	MT 1975/1976	2.480.750	2.157.075	86.9	2.476.963	55.074.470	71.1	49.538.177	5.536.253	10.1
12.	MT 1976	1.088.500	860.912	79.1	914.185	22.442.485	64.5	18.599.765	3.842.720	8.6
13.	MT 1976/1977	2.666.425	1.798.862	67.3	2.089.933	48.871.798	61.5	41.317.697	7.554.101	15.5
14.	MT 1977	1.119.300	675.069	60.3	635.349	17.534.636	52.4	12.248.677	5.285.959	30.2
15.	MT 1977/1978	2.720.200	1.561.811	57.4	1.799.120	44.550.076	54.0	37.914.637	6.635.439	15.0
16.	MT 1978	897.400	644.770	71.8	643.299	17.744.218	54.5	13.618.389	4.125.829	23.3
17.	MT 1978/1979	2.264.250	1.339.777	59.2	1.483.017	42.235.323	50.9	34.890.094	7.345.229	17.4
18.	MT 1979	896.150	437.172	48.8	412.837	12.983.968	37.5	10.667.564	2.316.404	18.0
19.	MT 1979/1980	2.147.500	1.110.817	51.7	1.181.317	36.313.088	43.0	30.431.512	5.881.576	16.2
20.	MT 1980	785.825	442.808	56.3	432.512	14.221.010	47.5	11.448.386	2.772.624	20.0
21.	MT 1980/1981	1.934.150	1.056.781	54.6	1.087.330	35.894.157	47.5	27.523.418	8.370.739	23.3
22.	MT 1981	970.380	534.562	55.1	555.893	18.892.772	50.1	14.163.436	4.729.286	30.4
23.	MT 1981/1982	2.073.680	1.078.797	52.0	1.184.280	43.609.046	49.8	26.799.716	16.809.330	38.2
24.	MT 1982	1.090.899	336.832	30.9	383.386	13.755.901	24.8	5.620.445	8.135.456	62.0
25.	MT 1982/1983	2.431.144	843.504	35.0	988.600	45.597.802	34.2	20.858.565	24.739.237	58.0
26.	MT 1983	973.885	203.897	21.3	199.468	9.411.605	16.0	3.272.752	6.138.853	65.2
Jumlah		30.658.206	25.446.827	65.1	20.218.960	619.535.571	46.0	487.692.372	131.843.199	21.3

Sumber : Kantor Besar BRI, 1984

## Lampiran 2.

Analisis Statistik Data Karakteristik Petani

Karakteristik dari petani peminjam kredit Bimas akan digambarkan secara statistik dengan jalan menghitung rata-rata, variabilitas, jumlah contoh dan angka-angka dalam bentuk persentase.

Rata-rata dihitung dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N},$$

dimana  $\bar{X}$  = rata-rata dari  $X$ ,  $\sum X$  = jumlah nilai pengamatan dan  $N$  = jumlah contoh pengamatan.

Untuk menghitung variabilitas sering digunakan simpangan baku (standard deviation). Demikian pula dalam penelitian ini. Dalam perhitungan simpangan baku, yang diperhatikan adalah pangkat dua (kuadrat) dari tiap-tiap penyimpangan dengan rumus:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{N}},$$

dimana  $s$  = simpangan baku,  $\sum (X - \bar{X})^2$  = jumlah kuadrat tiap-tiap penyimpangan dengan nilai rata-rata.

Penyusunan tabel untuk menganalisis karakteristik petani dengan memperhatikan distribusi frekuensi numerikal (numerical frequency distribution). Pembagian distribusi frekuensi numerikal dengan cara menentukan kelas-kelas dari distribusi frekuensi numerikal tersebut. Pembentukan kelas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Menentukan jumlah kelas dimana data akan dikelompokkan.
2. Menentukan interval tiap kelas.
3. Menentukan batas kelas.

### Menentukan jumlah kelas

Mengenai berapa banyaknya jumlah kelas yang akan dibentuk untuk suatu data tertentu tidak ada keseragaman pendapat. Hal ini tergantung pada: maksud dan tujuan pembentukan distribusi frekuensi, luas penyebaran (range) dari nilai-nilai pengamatan yang akan dikelompokkan, jumlah individu yang akan dikelompokkan dan jenis keterangan yang akan dikelompokkan.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah kelas, akan digunakan rumus yang diungkapkan oleh Herbert A. Sturges dalam Djarwanto (1982) yang terkenal dengan istilah Sturges rule:

$$k = 1 + 3.222 \log N,$$

dimana  $k$  = jumlah kelas,  $N$  = jumlah individu.

Untuk nilai-nilai ekstrim, yaitu nilai-nilai yang sangat besar atau nilai yang sangat kecil akan mendapatkan jumlah kelas yang agak kurang tepat. Untuk hal ini harus diadakan penyesuaian.

### Menentukan interval tiap kelas

Untuk menentukan interval kelas harus diketahui terlebih dahulu nilai luas penyebaran, nilai pengamatan yang tertinggi dan nilai pengamatan yang terendah dari suatu distribusi frekuensi yang akan dibentuk. Luas penyebaran



(range) dihitung dengan rumus:

$$R = X_h - X_l ,$$

dimana  $R$  = luas penyebaran (range),  $X_h$  = nilai pengamatan yang tertinggi dan  $X_l$  = nilai pengamatan yang terendah.

Untuk mendapatkan interval kelas, luas penyebaran tersebut harus dibagi dengan jumlah kelas ( $k$ ) yang diperoleh dengan menerapkan rumus Sturges terdahulu.

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Luas Penyebaran}}{k}$$

#### Menentukan batas kelas-batas kelas

Yang terpenting dalam langkah ini adalah menentukan batas kelas bawah yang terendah, sebab batas kelas-batas kelas yang lain merupakan kelanjutan saja dari batas kelas bawah yang terendah tersebut. Batas kelas bawah yang terendah tersebut ditentukan sedemikian rupa sehingga nilai pengamatan yang terendah dapat tercakup di dalamnya dan batas kelas tersebut nilainya harus sedemikian rupa sehingga mudah dibaca, mudah diingat, berkesan dalam pengenalan secara visual sehingga dalam perhitungan dan analisis lebih lanjut tidak menyulitkan perhitungannya.

Dalam menentukan batas kelas harus dihindari adanya batas kelas yang tumpang tindih (overlapping class limits). Distribusi frekuensi dengan kelas terbuka (open class) yang diartikan sebagai distribusi frekuensi yang tidak mempunyai batas kelas atas pada kelas terakhir maupun batas kelas bawah pada kelas pertama, dapat pula diterapkan.



## Lampiran 3.

Analisis Statistik untuk Memperoleh Hubungan/Pengaruh  
dan Pengujian Hubungan/Pengaruh

Dalam analisis ini data mengenai beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kembali (beberapa faktor yang menunjukkan karakteristik petani pe-  
minjam) disusun dalam tabel kontingensi. Setiap faktor karakteristik akan dilihat hubungannya dengan tingkat pem-  
bayaran kembali. Tingkat pembayaran kembali dibedakan da-  
lam dua golongan, yakni Tidak Menunggak (TM) dan Menunggak  
(M), sedangkan faktor karakteristik dibedakan dalam dua  
golongan pula, yakni lebih kecil atau sama dengan rata-ra-  
ta contoh dan lebih besar daripada rata-rata contoh.

Dalam tabel kontingensi yang dianalisis adalah freku-  
ensi dari beberapa kejadian dan mempelajari bagaimanakah  
hubungan satu dengan lainnya (Blalock, 1981). Analisis  
tabel kontingensi disusun dalam suatu tabel analisis dua  
arah, yang terdiri dari baris dan kolom. Baris menunjuk-  
kan golongan dari masing-masing faktor karakteristik peta-  
ni dan kolom menunjukkan golongan dari tingkat pembayaran  
kembali.

Tabel 3.1., merupakan tabel kontingensi 2 X 2 yang  
menunjukkan analisis tabel dua arah, yaitu antara salah  
satu faktor karakteristik petani dengan tingkat pembayaran  
kembali.



Tabel 3.1. Hubungan Antara Faktor Karakteristik Petani dan Tingkat Pembayaran Kembali

Karakteristik petani	Tingkat Pembayaran Kembali		Jumlah
	TM	M	
< rata-rata	a	b	$B_1 = a + b$
> rata-rata	c	d	$B_2 = c + d$
Jumlah	$K_1 = a + c$	$K_2 = b + d$	N

Pada baris, terlihat baris 1 dan baris 2 yang masing-masing menggambarkan golongan karakteristik petani, yakni di bawah atau sama dengan rata-rata contoh dan di atas rata-rata contoh. Sedangkan pada kolom menggambarkan golongan dari data tingkat pembayaran kembali yang dibedakan dengan TM dan M. Huruf-huruf a, b, c dan d dalam setiap sel/kotak menunjukkan frekuensi atau jumlah kasus atau persen terhadap jumlah pengamatan yang terdapat pada satu baris dan satu kolom tertentu. Misalnya a berarti jumlah kasus yang memenuhi tingkat pembayaran kembali TM dan tergolong faktor karakteristik petani dibawah atau sama dengan rata-rata. Untuk lebih memudahkan pengertian baris, golongan faktor karakteristik petani di bawah atau sama dengan rata-rata akan dituliskan golongan rendah/sempit/kecil disesuaikan dengan jenis faktor karakteristik petani. Sedangkan golongan yang berada di atas rata-rata akan dituliskan golongan tinggi/luas/besar. Pertambahan jumlah (marginal



total) menunjukkan jumlah masing-masing baris dan masing-masing kolom, contoh  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $K_1$  dan  $K_2$ .

Untuk memperoleh hubungan antara faktor karakteristik petani dengan tingkat pembayaran kembali, akan dilakukan uji Kai Kuadrat (Chi Square) dengan menggunakan tabel kontingensi tersebut di atas.

Untuk mencari Kai Kuadrat, langkah pertama adalah menghitung frekuensi yang diharapkan (expected frequencies) yaitu frekuensi yang terjadi bila tidak ada perbedaan dalam frekuensi pada dua variabel pokok (yaitu tidak ada perbedaan dalam tingkat pembayaran kembali menurut karakteristik petani). Frekuensi yang diharapkan ( $f_e$ ) dihitung dari jumlah kolom dikalikan jumlah baris pada setiap sel. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$f_{e_a} = \frac{K_1 \times B_1}{N},$$

dimana

$f_{e_a}$  = frekuensi yang diharapkan pada sel a

$K_1$  = jumlah pada kolom TM

$B_1$  = jumlah pada baris golongan di bawah atau sama dengan rata-rata

$N$  = jumlah contoh

Dengan jalan yang sama dapat dihitung  $f_{e_b}$ ,  $f_{e_c}$  dan  $f_{e_d}$ .

Untuk memperoleh angka Kai Kuadrat,  $f_o$  (frekuensi yang diperoleh dari hasil penelitian) dikurangi  $f_e$ , dan hasilnya dikuadratkan dan kemudian dibagi  $f_e$ . Hasil untuk setiap sel kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan Kai Kuadrat.

Rumus lengkap untuk Kai Kuadrat ( $X^2$ ) adalah:

$$X^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

Untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh tersebut berhubungan secara nyata (significant) atau tidak, harus dihitung derajat kebebasan (degrees of freedom) terlebih dahulu. Derajat kebebasan (dk) dihitung dari jumlah kolom dikurangi satu dikalikan jumlah baris dikurangi satu atau  $dk = (k - 1)(b - 1)$ . Setelah itu, dengan membandingkan hasil  $X^2_{\text{hitung}}$  dengan  $X^2_{\text{tabel}}$ , pada dk dan tingkat nyata tertentu, maka apabila  $X^2_{\text{hitung}} > X^2_{\text{tabel}}$  berarti tolak hipotesis nol dan terima hipotesis tandingan. Keadaan sebaliknya terjadi, jika  $X^2_{\text{hitung}} < X^2_{\text{tabel}}$ . Hipotesis nol dalam penelitian ini telah disusun dalam bab Metodologi Penelitian.

Adapun untuk menguji keeratan hubungan digunakan perhitungan koefisien kontingensi menurut Cramer (=C), sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{N + X^2}}$$

Kekhususan nilai C untuk tabel kontingensi 2 X 2, adalah nilai tertingginya tidak sama dengan satu, melainkan 0.707. Hal ini dikarenakan nilai  $X^2$  tertinggi untuk tabel kontingensi 2 X 2 adalah sama dengan N (jumlah contoh), sehingga

$$\sqrt{\frac{N}{N + N}} = 0.707. \text{ Keadaan ini berakibat untuk mengartikan}$$

nilai C hasil perhitungan, harus dibagi bilangan 0.707.

Lampiran 4.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG

Nomor	: EK.011/205/1982	Jombang, 27 April 1982
Lampiran	: --	Kepada
Perihal	: Penyelesaian tung- gakan kredit pro- gram massal (Inpres 10/1981)	Yth. Camat, Kepala Wila- yah Kecamatan se - Kabupaten Jombang

Menunjuk surat kami tanggal 7 April 1982 No.EK.011/169/1982, perihal tersebut di atas dengan ini mengharap agar para peserta TRI yang mempunyai tunggakan kredit program massal (Inpres 10/1981) Bimas padi/palawija/PUTP dalam panen tebu tahun 1982 - agar hatsilnya (bagi hasil) yang diterima dipotong untuk menyelesaikan tunggakan kredit program massal tersebut, termasuk penerimaam COL 1982/1983.

Pelaksanaan pemotongan tersebut dilakukan oleh BPR/BRI/PG yang bersangkutan.

Demikian untuk dilaksanakan dan laporkan hatsilnya.

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Jombang,

t.t.d.

A. Hudan Dardiri



Lampiran 5

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.30/Pres/6/1977

Jakarta, 25 Juni 1977

Sifat :

Lamp. : 1 (satu)

Kepada Yth. :

Perihal: Pelaksanaan BIMAS  
dan masalah pengem-  
balian kredit BIMAS

Para Gubernur/Kepala Daerah Ting-  
kat I/Ketua Badan Pembina BIMAS ;

Para Bupati/Kepala Daerah Tingkat  
II/Ketua Badan Pelaksana BIMAS  
Kabupa ten ;

Para Camat/Ketua Badan Pelaksana  
BIMAS Kecamatan

di -

SELURUH INDONESIA.

Bersama ini saya minta perhatian Saudara atas hal-hal dan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Sebagaimana dimaklumi sektor pertanian merupakan titik pusat dari pada seluruh kegiatan pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional, baik dalam REPELITA I yang lalu maupun dalam REPELITA II yang sekarang ini sedang kita laksanakan. Sasaran pokok pembangunan di sektor pertanian tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia dengan hasil produksi dalam negeri, dengan jalan meningkatkan produksi pangan. Untuk mencapai sasaran tersebut Pemerintah melancarkan program intensifikasi produksi pangan, yang dikenal dengan nama BIMAS dan INMAS, melalui "PANCA USAHA". Saudara telah dipercayai dan ditugasi oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pelaksanaan program intensifikasi ini di daerah masing-masing.



2. Untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan program peningkatan produksi pangan tersebut, maka ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian :
    - 1). Luas areal yang mengikuti program intensifikasi harus terus menerus ditingkatkan ;
    - 2). Penyaluran sarana-sarana produksi harus berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak boleh ada hambatan dalam bentuk apapun ;
    - 3). Pengembalian kredit harus berjalan lancar dan dicegah adanya kelambatan atau tunggakan.
  3. Mengenai masalah areal, perlu selalu mendapat perhatian agar rencana peningkatan produksi yang ditetapkan dapat dipenuhi, dengan jalan memanfaatkan semaksimal mungkin luas areal tanah yang memungkinkan mengikuti program intensifikasi, baik BIMAS maupun INKAS, di daerah-daerah dimana tersedia pengairan yang cukup. Perbaikan dan pembangunan prasarana irigasi yang terus menerus dilakukan Pemerintah untuk menunjang usaha perluasan areal intensifikasi ini, perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh para petani.
  4. Perluasan areal tanah intensifikasi, harus dibarengi dengan penyaluran yang lancar dari pada sarana-sarana produksi yang diperlukan, yaitu bibit unggul, pupuk, obat-obatan anti hama. Khususnya mengenai pupuk, dewasa ini produksi pupuk telah meningkat sedemikian rupa sehingga kita telah dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhan dalam negeri. Apabila dulu penggunaan pupuk masih dibatasi dosisnya, hanya sampai minimal yang diperlukan (200 kg urea) maka sekarang dengan makin meningkatnya produksi pupuk di dalam negeri penggunaan pupuk dapat dan harus ditingkatkan agar diperoleh hasil produksi yang sebesar-besarnya.
- Untuk itu, disamping mengadakan paket BIMAS/INKAS baru dengan meningkatkan jumlah pupuknya, juga penyalurannya perlu dijamin kelancarannya.



Pemerintah sedang mengambil langkah-langkah agar penjualan pupuk eceran untuk rakyat dapat diperluas sehingga sewaktu-waktu petani memerlukan pupuk akan dapat membeli dan dilayani dengan cepat.

5. Mengenai masalah pengembalian kredit BIMAS, saya mengharapkan agar para pembina dan pelaksana BIMAS, khususnya para Bupati dan Camat memberikan perhatian yang lebih besar dan sungguh-sungguh.

Pengembalian kredit tersebut umumnya kurang lancar bahkan di beberapa daerah sangat terlambat dan menimbulkan tunggakan yang cukup besar. Mengingat bahwa dana kredit tersebut setelah dikembalikan akan digunakan lagi untuk pemberian kredit musim tanam berikutnya, maka kekurang lancaran dalam pengembaliannya bukan saja akan menimbulkan kesulitan bagi Pemerintah dan Bank yang bersangkutan, akan tetapi akan menghambat pelaksanaan program BIMAS, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran produksi pangan. Disamping itu tunggakan terhadap pinjaman tidak dapat dibiarkan karena tidak bersifat mendidik kepada para peminjam yang lalai memenuhi kewajiban itu.

6. Saya percaya bahwa apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kerja keras dan pendekatan yang tepat, pasti pengembalian kredit BIMAS itu dapat berjalan dengan lancar.

Saya ingin mengemukakan suatu contoh, yaitu Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk selama beberapa tahun ini selalu berhasil mengembalikan seluruh kredit BIMAS-nya dan tidak ada masalah tunggakan. Kabupaten Nganjuk tentunya menghadapi juga persoalan-persoalan yang dihadapi Kabupaten lainnya, akan tetapi Kabupaten ini telah membuktikan kesanggupan untuk mengatasinya dengan cara yang sederhana tetapi efektif, dan dapat diterapkan dimana saja.

7. Saya melampirkan laporan pelaksanaan BIMAS dan pengembalian kredit BIMAS di Kabupaten Nganjuk yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program BIMAS di Kabupaten ini. Juga disertakan



penjelasan-penjelasan mengenai cara dan pendekatan yang ditem-  
puh oleh Bupati Nganjuk, yang memungkinkannya mencapai hasil  
tersebut.

Saya mengharapkan agar laporan tersebut menjadi bahan bagi  
Saudara dan dari padanya dapat ditarik hal-hal yang bermanfaat  
untuk diterapkan. Dengan menarik pelajaran dan pengalaman, ba-  
ik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, saya meng-  
harapkan bahwa di masa yang akan datang di daerah Saudara ti-  
dak akan ada lagi soal dalam pengembalian kredit BIMAS.

Demikian hendaknya petunjuk-petunjuk di atas mendapat perha-  
tian Saudara dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

S O E H A R T O



LAMPIRAN  
Surat Presiden  
Nomor : B-30/PRES/6/1977  
Tanggal : 25 Juni 1977

Pengembalian Kredit BIMAS  
di Kabupaten Ngenjuk

1. Realisasi BIMAS Rendengan adalah sebagai berikut :

	<u>Luas (ha)</u>	<u>Jumlah Petani</u>	<u>Pelunasan</u>
M.T. 1971/72	17 460	32 591	100 %
M.T. 1972/73	25 054	45 784	100 %
M.T. 1973/74	32 700	55 543	100 %
M.T. 1974/75	33 557	56 770	100 %
M.T. 1975/76	33 590	55 670	100 %
M.T. 1976/77	33 629	54 069	100 %

2. Realisasi BIMAS Gadu adalah sebagai berikut :

	<u>Luas (ha)</u>	<u>Jumlah Petani</u>	<u>Pelunasan</u>
M.T. 1972	551	1 118	100 %
M.T. 1973	1 263	2 070	100 %
M.T. 1974	4 218	7 898	100 %
M.T. 1975	5 988	13 691	100 %
M.T. 1976	14 872	26 090	90 %

3. Pelunasan kredit BIMAS yang sangat baik antara lain berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Bupati beserta aparat Pemerintah Daerah memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelaksanaan BIMAS, termasuk pengembalian kredit BIMAS.
- (b) Sebelum musim panen diadakan kampanye BIMAS di masing-masing desa dengan jadwal tertentu. Penerangan dan penyuluhan meliputi pula masalah pengembalian kredit BIMAS.

- (c) Untuk tiap-tiap musim diadakan penjadwalan pengembalian kredit BIMAS yang harus diusahakan oleh masing-masing desa dan kecamatan. Misalnya untuk kredit BIMAS rendengan ditetapkan berapa persen yang harus kembali dalam bulan April, Mei, Juni dan Juli dengan sasaran bahwa pada akhir bulan Juli seluruh kredit telah dibayar kembali.
- (d) Pelaksanaan pengembalian kredit BIMAS di tiap-tiap kecamatan dimonitor secara terus menerus oleh Bupati berdasarkan laporan mingguan B.R.I. Demikian pula Camat memonitor untuk tiap-tiap desa. Secara periodik Kepala-Kepala Desa memperoleh dari B.R.I. Unit Desa melalui Camat sebuah daftar pengembalian kredit BIMAS oleh masing-masing petani di desanya.
- (e) Secara periodik Bupati mengedarkan kepada semua Camat daftar pengembalian kredit BIMAS dari semua kecamatan, sehingga masing-masing Camat mengetahui pengembalian kredit BIMAS di kecamatan-kecamatan lain. Edaran tersebut disertai peringatan-peringatan terhadap Camat-Camat yang pengembaliannya masih rendah. Camat melakukan hal yang serupa terhadap Kepala Desa.
- (f) Bupati mengenakan sanksi terhadap Camat yang daerahnya menunjukkan tunggakan BIMAS yang cukup besar. Sanksi tersebut antara lain berbentuk pemanggilan Camat ke kantor Bupati dan selama 1 - 2 hari Camat tersebut berada di kantor Bupati tanpa dimintai keterangan. Camat melakukan hal yang serupa terhadap Kepala Desa.
- (g) Pengembalian kredit BIMAS lebih didahulukan dari pada pembayaran IPEDA. Penjualan hasil panen dipergunakan pertama-tama untuk mengembalikan kredit BIMAS, sehingga dalam bulan Juli kredit BIMAS rendengan telah dilunasi. IPEDA ditarik sesudah kredit BIMAS dilunasi dan dapat dicicil selama jangka waktu Juli - Desember.



- (h) Dalam pelaksanaan kegiatan gotong-royong di desa tidak dibenarkan adanya pungutan pembiayaan. Kegiatan gotong-royong berbentuk pengerahan tenaga. Dengan demikian uang tunai hasil penjualan panen yang ada pada petani tidak diserap oleh pungutan-pungutan. Demikian pula pembangunan Balai Desa dan lain-lain berbentuk sederhana sehingga tidak diperlukan pungutan-pungutan dari petani.
- (i) Pemerintah Daerah juga memberikan perangsang kepada para pejabat dan petugas dalam melaksanakan BIMAS, termasuk dalam pengembalian kredit BIMAS. Demikian pula diberikan hadiah kepada desa-desa yang menjadi pemenang perlombaan BIMAS dan melaksanakan pengembalian kredit BIMAS dengan baik.
- (j) Pembinaan administrasi BIMAS, termasuk kredit BIMAS, dilakukan secara terus-menerus, sedang koordinasi antara berbagai jawatan berlangsung secara efektif.

Jakarta, 14 Juni 1977.

